

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF, ATRAKTIF, SUBSTANTIF

Edisi Mei | Tahun 2022 No. 33

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Dr. Salim*

*Refleksi Idul Fitri:*

## *Lahirnya Pemimpin Yang Merakyat*





# Idul Fitri: Raih Kemenangan, Hadirkan Kesejahteraan

Ujian dan tantangan adalah fitrah yang senantiasa akan dihadapi oleh semua bangsa, menjadi tolok ukur dalam kematangan dan kedewasaan. Maka keadaban kita dalam berpolitik sudah sepatutnya dan seharusnya mendorong produk-produk terbaik yang bisa menyejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan hukum.

Idul Fitri sebagai puncak dari bulan Ramadan adalah satu momen penting sejarah seorangan kepribadian seseorang. Bagi yang menjalankan puasa dengan penuh kekhayusan maka dia akan mendapatkan peningkatan keimanan. Adapun yang sebaliknya maka dia anggap telah terlepas dari belenggu ujian. Bebas dan lepas tanpa ada aturan yang mengenainya.

Ramadhan diharapkan pada akhirnya membekas dalam pola perilaku dan sikap di sepanjang kehidupan setiap pribadi. Tutur kata santun,

mampu menahan diri dari perilaku yang buruk dan sikap yang tidak terpuji. Selaras dengan itu, mudah memaafkan dan berlomba-lomba dalam menghadirkan kebaikan.

Tentu jika setiap kita mencoba untuk konsisten dan komitmen dengan nilai-nilai tersebut, maka kehidupan sosial yang harmonis bisa kita wujudkan. Setiap usaha tersebut akan menjadi amal jariah yang luar biasa untuk peradaban bangsa yang lebih baik.

Kehendak yang luar biasa untuk kembali ke kampung halaman, yang kerap kita sebut

dengan mudik, menjadi salah satu modal penting untuk membangun toleransi, tepa selira, tenggang rasa dan gotong royong. Dari kampunglah kita banyak belajar tentang kohesi dan harmoni sosial. Guyub. Nilai-nilai yang seakan sangat jauh dari kehidupan kita saat ini.

Dus, perbedaan pandangan tidak sepatutnya kemudian dilabeli dengan perbedaan kepentingan. Bisa jadi kita punya kepentingan yang sama namun disampaikan dengan cara yang berbeda. Mungkin niat kita sama namun

bisa jadi cara dan jalan yang kita tempuh berbeda. Karena sesungguhnya ada terlalu banyak alternatif kebaikan yang bisa datang dari siapapun, dari manapun dan kapanpun.

Fitrah, menempatkan jabatan sesuai muasalnya untuk menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya mengkhianati dan menghadirkan kebijakan yang buruk. Memaksakan kehendak di tengah himpitan ekonomi yang luar biasa, apalagi ternyata hanya untuk segelintir pihak. Tentu perilaku seperti itu sedang menegaskan sikap yang buruk.

Ujian dan tantangan

adalah fitrah yang senantiasa akan dihadapi oleh semua bangsa, menjadi tolok ukur dalam kematangan dan kedewasaan. Maka keadaban kita dalam berpolitik sudah sepatutnya dan seharusnya mendorong produk-produk terbaik yang bisa menyejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan hukum.

Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqobbalallahu Minna waminkum. Mohon dimaafkan segala pesan, informasi dan publikasi yang kurang berkenan. Mari kita raih kemenangan yang kurang menghadirkan kesejahteraan.



Segenap Keluarga Besar  
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI  
Mengucapkan :

*Selamat Hari Raya*  
**Idul Fitri**

*1 Syawal 1443 H*

Taqabbalallaahu minna waminkum

**Putihkan HATI, Segarkan DIRI  
dengan saling memaafkan  
di hari nan FITRI**



**Dr. Salim**

Ketua Majelis Syuro PKS



**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



# Refleksi Idul Fitri: Lahirnya Pemimpin Yang Merakyat

OLEH

**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

image: istimewa

Hari Raya Idul Fitri dimaknai secara beragam oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Yang paling lumrah, disambut sebagai hari kemenangan.

Ini jenis peperangan sangat unik, bukan melawan siapa (against whom), tetapi melawan apa (against what). Yakni, hawa nafsu yang lebih besar bahayanya dari segala jenis musuh.

Makna lain adalah kembali kepada fitrah (the nature of human). Sejalan dengan hadits sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sanadnya dari Abu Hurairah r.a.: "Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadhan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu." Putih bersih seperti bayi yang baru dilahirkan.

Pemaknaan berbeda membentuk sikap dan disiplin berbeda pula. Bagi mereka yang ingin merebut kemenangan, maka bulan Ramadhan dipersepsikan sebagai kawah candradimuka untuk membakar segala rupa nafsu angkara. Bukan kebetulan, jika Muhammad Rasulullah Saw sendiri menghadapi perang besar (Ghazwat al-Badr) pada tanggal 17 Ramadhan tahun 2 Hijriyah (17 Maret 624 Masehi). Semangat berkobar untuk menaklukkan hawa nafsu

berujung pada pekik takbir, tahlil dan tahmid.

Itu salah satu keunggulan nilai Islam yang universal, karena mampu memadukan potensi kemarahan (ghadab) dan perlawanan (muqawamah) dengan kemaafan (afwu) dan perdamaian (salam) dalam diri sendiri. Betapa keliru, pandangan segelintir pengamat yang berteori bahwa persepsi tentang jihad dan ghirah Islam memunculkan sikap intoleran dan kekerasan (terorisme). Mereka hanya memahami Islam dari sisi aspek negatif.

Sementara, mereka yang ingin kembali ke fitrah diri akan melakukan proses purifikasi menuju orisinalitas atau otentisitas pribadi. Menanggalkan segala kepalsuan dan pencarian yang justru melahirkan kekosongan makna hidup. Kekayaan (fortune), kemasyhuran (fame), dan kekuasaan (power) merupakan target yang dikejar kebanyakan manusia. Bahkan, ada orang yang sengaja bermain-main (play the game) untuk mendapat semua kepalsuan itu. Ketika kesadaran meruak,

# Refleksi Idul Fitri: Lahirnya Pemimpin Yang Merakyat (2)

maka orang terkaya (crazy rich), figur populer (celebrity) dan tokoh berkuasa (powerful person) akan tunduk.. Lemah tak berdaya. Kekayaan, kemasyhuran dan kekuasaannya ternyata tak bisa membantunya mencapai tujuan yang diinginkan atau menyelamatkan dirinya dari marabahaya. Dari sini kita menyaksikan fenomena hirah yang melanda berbagai kalangan di seluruh pelosok dunia.

Tetapi, ada makna lebih sederhana dari Idul Fitri, yaitu hari berbuka (afthara, yufthiru) setelah sebulan penuh berpuasa. Pada saat berbuka (karena menjalankan kewajiban) kita

merasakan betul penderitaan orang-orang yang berpuasa karena terpaksa (tidak ada yang bisa dimakan), orang-orang miskin yang bertahan hidup di bawah standar normal. Setelah berbuka, apakah kita akan 'kembali' kepada gaya hidup semula: berfoya-foya dan penuh kemubaziran?

Makna sederhana itu (berbuka) sejalan dengan makna perang dan purifikasi. Bahkan, saling melengkapi. Perang besar (jihad al-akbar) yang telah dimenangkan dan otentisitas diri yang telah ditemukan membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup manusia. Setiap orang akan

terlahir kembali (reborn) dengan kualitas hidup lebih baik. Secara khusus, bulan Ramadhan menggembelng mereka yang berkualifikasi sebagai pemimpin agar peduli dengan nasib rakyat kecil.

Pemimpin yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan benar-benar peduli dengan warga yang hidup dalam kekurangan, bukan hanya terbius dengan capaian angka statistik. Dari mereka inilah lahir suri teladan di tengah masyarakat, baik sebagai individu maupun tokoh yang dipercaya publik. Tidak ada kontradiksi atau manipulasi perilaku. Tak perlu berpura-pura dalam pencitraan.

Baca Juga: Unik Banget! Sumpit Listrik Buatn Jepang Ini Bisa Tingkatkan Rasa Asin Makanan

Ramadhan menjadi persemiaan manusia-manusia baru, akan terbentuk pribadi-pribadi yang memiliki kesalahan personal, kemudian bertransformasi menjadi kesalahan kolektif. Kesalahan kolektif selanjutnya dapat memperbaiki kondisi bangsa dan negara yang sedang terpuruk, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Ukuran keberhasilan training Ramadhan selama satu bulan



**Memperkuat nilai-nilai tauhid** merupakan kebutuhan paling fundamental bagi seorang pemimpin sebelum mengarahkan masyarakatnya.

akan terlihat dalam praktek yang dijalankan selama sebelas bulan ke depan.

Bagi seorang pemimpin, Ramadhan merupakan momentum untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Ta'ala (Malik al-mulk). Tidak ada yang ditakutinya selain Sang Pencipta dan semua tindak-tanduknya selalu diawasi oleh Sang Mahamelihat. Dia tidak takut pada sorotan media atau desakan publik, tapi takut pada janji-janjinya sendiri yang pernah diucapkan dan nanti di akhirlah justru menjadi beban

pertanggungjawaban.

Memperkuat nilai-nilai tauhid merupakan kebutuhan paling fundamental bagi seorang pemimpin sebelum mengarahkan masyarakatnya. Sebagaimana dilakukan Nabi Ibrahim a.s. dalam mencari nilai-nilai tauhid sebelum memperbaiki keyakinan umatnya dan juga dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. dengan berdiam diri (tahannuts) di gua Hira sebelum tampil menata kembali kepercayaan masyarakatnya untuk menyembah Allah Ta'ala semata. Di gua Hira itu,

**KUTIPAN**

Selain perayaan penuh dengan kegembiraan dan suka cita, Idul-Fitri juga menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa spiritualitas. Sosok itu mencerminkan lahirnya kembali pemimpin yang bersih, peduli dan dekat dengan masyarakat. Meninggalkan segala jejak (legacy) untuk kesejahteraan masyarakat, bukan keamanan pribadi dan keluarga

# Refleksi Idul Fitri: Lahirnya Pemimpin Yang Merakyat (Tamat)



Pada tataran kebijakan, kita melihat masih minimnya sikap dan kesadaran para pemimpin terhadap krisis (sense of crisis) dan **kesadaran akan kesigapan bertindak (sense of urgency)**, sehingga seolah-olah pemimpin tidak hadir menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat

Nabi Muhammad menerima wahyu Allah pertama kali, pada bulan Ramadhan.

Selain perayaan penuh dengan kegembiraan dan suka cita, Idul-Fitri juga menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki jiwa spiritualitas. Sosok itu mencerminkan lahirnya kembali pemimpin yang bersih, peduli dan dekat dengan masyarakat. Meninggalkan segala jejak (legacy) untuk kesejahteraan masyarakat, bukan keamanan pribadi dan

keluarga. Ruang privat yang dimilikinya sudah semakin mengecil dan digantikan dengan ruang publik yang semakin membesar.

Bangsa kita masih memiliki pekerjaan rumah mendasar, permasalahan yang menunjukkan kesenjangan dengan cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa yang tertancup dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Beberapa persoalan mendasar yang masih kita hadapi saat ini, antara lain: Masih tingginya

tingkat korupsi (IPK: 38), angka kemiskinan (9,71%) dan pengangguran (6,49%), terdapat anak-anak dengan kondisi gizi buruk dan stunting di beberapa daerah (24,4%), serta ketimpangan pembangunan yang cukup lebar antar wilayah di Indonesia (0,381).

Pada tataran kebijakan, kita melihat masih minimnya sikap dan kesadaran para pemimpin terhadap krisis (sense of crisis) dan kesadaran akan kesigapan bertindak (sense of urgency), sehingga seolah-olah pemimpin tidak hadir menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Saat ini masyarakat dihadapkan pada kondisi tingginya harga-harga bahan kebutuhan pokok yang dimulai dengan kenaikan harga minyak goreng yang sudah berlangsung selama hampir sembilan bulan sejak September 2021 hingga saat ini.

Kebijakan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat tidak kunjung hadir, justru sebaliknya Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menambah beban hidup masyarakat semakin berat. Tercatat kenaikan harga barang yang seharusnya bisa dikendalikan Pemerintah (Administered price) sepanjang

2022, antara lain: kenaikan harga Pertamina, elpiji non-subsidi, tarif beberapa ruas tol, tarif PPN, yang semuanya bisa memicu kenaikan harga barang-kebutuhan pokok masyarakat.

Datangnya Idul Fitri yang disepakati semua ormas keagamaan, penuh kegembiraan dan suka cita seolah-olah menutup beratnya beban hidup yang dirasakan sebagai besar masyarakat. Tapi, pemimpin sejati tidak membiarkan 'kegembiraan palsu' yang justru memendam ledakan keresahan dalam jangka dekat atau panjang.

Pemimpin yang memahami kegelisahan rakyat akan mencari jalan keluar paling selamat

untuk semua. Terutama dengan mengendalikan nafsu kuasa (perpanjangan masa jabatan) dan meninggalkannya segala kepulauan yang tercipta (pencitraan). Pemimpin sejati tidak terjebak oleh pujian para buzzer dan pemujanya, tetapi juga tidak terpancing emosi oleh para haters dan pengkritiknya. Telah berlalu berbagai model kepemimpinan dalam sejarah Indonesia. Kita berharap pemimpin yang akan lahir mencerminkan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.\*\*\*

\*) Ketua Majelis Syura PKS dan Wakil Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia (IUMS).

## KUTIPAN

“Datangnya Idul Fitri yang disepakati semua ormas keagamaan, penuh kegembiraan dan suka cita seolah-olah menutup beratnya beban hidup yang dirasakan sebagai besar masyarakat. Tapi, pemimpin sejati tidak membiarkan ‘kegembiraan palsu’ yang justru memendam ledakan keresahan dalam jangka dekat atau panjang. “

**BERITA FOTO**

Buka Puasa Bersama dan Aksi Solidaritas Sosial PKS bagi masyarakat kurang mampu



# Gencarkan Gernas Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan



Jakarta (27/04) --- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al-Jufri menggelar Buka Puasa Bersama sekaligus Aksi Solidaritas Sosial PKS bagi masyarakat kurang mampu pada hari Rabu, (27/04) di Jakarta.

Program Gernas Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan ini merupakan komitmen, ikhtiar, dan kolaborasi PKS sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk hadir menyelesaikan permasalahan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan beban rakyat. Inilah upaya PKS untuk mewujudkan solidaritas sosial Nasional bangsa Indonesia

**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI

# Legislator PKS : Miris..! Negara Internasional Terapkan Standar Ganda Terhadap Palestina

## KUTIPAN

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyebut bahwa dunia internasional memiliki standar ganda. "Penjajahan Israel di Palestina sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Namun, respon negara-negara di dunia berbeda. Dukungan besar kepada Ukraina namun tidak ada dukungan berarti bagi negara Palestina

Jakarta (26/04) — Israel telah berhasil merampas Masjid Al-Aqsa. Jumat pekan lalu polisi Israel menyerang 2.000 umat Islam yang baru saja menunaikan ibadah salat subuh diusir dari Masjid Al-Aqsa.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Sukamta menyebut bahwa dunia internasional memiliki standar ganda.

"Penjajahan Israel di Palestina sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Namun, respon negara-negara di dunia berbeda. Dukungan besar kepada Ukraina

namun tidak ada dukungan berarti bagi negara Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kedaulatan negara berada dibawah kepentingan politik, ekonomi negara-negara di dunia," ungkap Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.

Kondisi dunia internasional yang terus bergejolak, imbuhnya, menjadi ujian kemampuan Indonesia dalam memimpin dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan

tersebut.

"Posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 tentu posisi strategis. Indonesia harus menunjukkan kapasitas kepemimpinan di level dunia dalam memimpin negara berkembang dan negara maju dalam menyelesaikan masalah Palestina. Kemampuan diplomasi harus diperkuat, jangan sampai kepemimpinan di G-20 disia-siakan dan membuat negara-negara di dunia kehilangan kepercayaan kepada Indonesia," tandasnya.

Sebagai informasi Masjid Al-Aqsa diakui Internasional sebagai tempat beribadah umat Islam di bawah pengawasan Yordania.

Namun, Israel mengabaikan keputusan Internasional dengan menguasai kawasan tersebut kemudian melarang umat muslim Palestina beribadah dan membebaskan rakyat Israel mengunjungi Masjid Al-Aqsa.



**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

"Penjajahan Israel di Palestina sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Namun, respon negara-negara di dunia berbeda. Dukungan besar kepada Ukraina namun tidak ada dukungan berarti bagi negara Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kedaulatan negara berada dibawah kepentingan politik, ekonomi negara-negara di dunia"



# Korban Begal Jadi Tersangka, Habib Aboe: Sangat Berbahaya dan Berpotensi Tingkatkan Angka Kejahatan

## KUTIPAN

"Perkara ini perlu diluruskan, jangan sampai disalahpahami. Yang tentunya hal ini akan bisa menjadi blunder di tengah masyarakat. Selain itu, Polri perlu melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika menghadapi penjahat", tegasnya.

Jakarta (16/04) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menyortir proses penanganan perkara Begal oleh Polri di Lombok tengah menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Menurutnya, langkah Polri menetapkan korban begal bernama Amaq Sinta sebagai tersangka bukanlah keputusan yang tepat.

"Hal ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, namun juga akan banyak membawa dampak

ikutan. Misalkan saja, masyarakat akan menjadi takut untuk melakukan pembelaan diri jika ada sesuatu kejahatan yang menimpa mereka. Disisi lain, apabila ada kejahatan yang terjadi di depan umum, masyarakat akan cenderung membiarkan. Hal ini disebabkan karena mereka takut menjadi tersangka, jika nanti melawan penjahat", ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (16/04).

Legislator yang kerap

disapa Habib Aboe ini menilai jika keputusan itu tak segera dikoreksi, maka akan sangat membahayakan.

"Kejadian ini bisa membuat para penjahat over confident, karena mereka merasa punya hak dilindungi. Tentu ini akan bisa membangkitkan mens rea dari para pelaku kejahatan", ujarnya. Oleh karenanya, Habib Aboe meminta kepada Kapolri untuk bertindak cepat dalam menetralsisir kegaduhan akibat kasus tersebut.

"Perkara ini perlu diluruskan, jangan sampai disalahpahami. Yang tentunya hal ini akan bisa menjadi blunder di tengah masyarakat. Selain itu, Polri perlu melakukan edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan ketika menghadapi penjahat", tegasnya.



## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

"Langkah Polri menetapkan korban begal bernama Amaq Sinta sebagai tersangka bukanlah keputusan yang tepat. Hal ini tidak hanya menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, namun juga akan banyak membawa dampak ikutan. Misalkan saja, masyarakat akan menjadi takut untuk melakukan pembelaan diri jika ada sesuatu kejahatan yang menimpa mereka. Disisi lain, apabila ada kejahatan yang terjadi di depan umum, masyarakat akan cenderung membiarkan. Hal ini disebabkan karena mereka takut menjadi tersangka, jika nanti melawan penjahat"

# Anggota Komisi III DPR RI Sebut Kasus Minyak Goreng Celah Baru Berantas Mafia-mafia lain

## KUTIPAN

Pandeglang (22/04) --- Ditetapkannya Dirjen Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen-PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Indrasari Wisnu Wardhana oleh Jaksa Agung membuat Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Dimiyati Natakusumah angkat bicara.

Menurut Dimiyati, kasus minyak goreng ini bisa menjadi celah masuk untuk memberantas mafia-mafia lain yang memang merugikan negara.

"Kasus mafia minyak goreng ini bisa menjadi pintu masuk penegak hukum dalam memberantas mafia lain seperti mafia daging, ilegal logging, tambang dan mafia batubara yang merugikan lingkungan dan keuangan negara. Kita dari Komisi III terus melakukan monitoring untuk kasus ini dan kasus hukum yang merugikan keuangan negara," kata Dimiyati lewat telepon selulernya, Jumat

(21/4/2022).

Anggota legislator asal daerah pemilihan Banten 1 (satu) ini mengaku heran, padahal selama satu dekade Indonesia masih mencatatkan diri sebagai negara dengan penghasil CPO terbesar di dunia. Posisi itu, kata Dimiyati tentu saja tak lepas dari luas perkebunan sawit di Indonesia.

"Sangat aneh, kenapa Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, masa masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Ternyata terbukti ada yang salah dalam

pengelolaannya. Dengan langkah jaksa agung bisa terjawab ternyata ada kartel dan mafianya," jelas Dimiyati menegaskan.

Dimiyati menjelaskan, saat pidato Presiden Jokowi, beliau meminta kepada penagah hukum agar pelaku mafia minyak goreng segera ditindak. Kemudian, saya melihat Quik respon Jaksa Agung sangat cepat dengan menetapkan pejanat Kemendag. Dimiyati mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Jaksa Agung dalam menangani kasus mafia minyak goreng yang merugikan masyarakat.

Disinggung terkait adanya kemungkinan keterlibatan pejabat setingkat Menteri, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke Kejaksaan Agung. Menurut Dimiyati, keterlibatan atau tersangka lain bisa diketahui setelah tim penyidik dari penegak hukum melakukan pemeriksaan.

"Nanti Komisi III juga akan mengundang Kepolisian sebagai Satgas Pangan dan Keajaasan dari sisi penuntutannya. Pastinya kita



**DR. H. R. A. DIMYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**  
Anggota Komisi III DPR RI

"Sangat aneh, kenapa Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, masa masyarakat Indonesia sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Ternyata terbukti ada yang salah dalam pengelolaannya. Dengan langkah jaksa agung bisa terjawab ternyata ada kartel dan mafianya,"

memendorong agar kasus mafia minyak goreng ini diurus tuntas, sehingga ekonomi di Indonesia bisa kembali berjalan normal," terang Dimiyati yang merupakan Politisi Fraksi PKS.

Sebelumnya, diberitakan Kejaksaan Agung (Kejagung)

menetapkan empat orang tersangka kasus ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Seorang di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

# Apapun Kebijakan Terhadap Migor, Aleg PKS: Yang Penting Harga Normal, Petani Sejahtera

## KUTIPAN

Kabupaten Bone (24/04) --- Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin, memperhatikan telah terkuak adanya perilaku menyimpang pada kebijakan minyak goreng yang melibatkan pengusaha dan oknum pejabat pemerintah di kementerian perdagangan, ia menuntut agar ada penyelesaian hingga tuntas.

Akmal sebagai pencetus ide dibentuknya pansus minyak goreng ini terus menyuatkan agar persoalan minyak goreng yang sudah lebih tujuh bulan terkatung-katung menyusahkan rakyat agar dapat segera di selesaikan.

"Rakyat ini mayoritas keinginannya sederhana. Yang penting harga minyak goreng kembali normal seperti tahun lalu. Kebutuhan minyak goreng yang bermasalah sekitar 10 persen atau sekitar 5,7 juta ton per tahun. Sedangkan total produksi minyak goreng yang

mencapai 47 juta ton per tahun untuk CPO dan 4,5 juta ton per tahun untuk palm kernel oil (PKO). Jadi mestinya alasan apa kok minyak goreng ini bermasalah berkepanjangan", tutur Akmal mempertanyakan.

Pengumuman presiden Jokowi pada pelarangan minyak goreng untuk di ekspor berlaku mulai dari 28 April 2022 hingga batas waktu yang akan ditentukan menurut Akmal tidak menjadi masalah asal petani tidak merugi. 41 persen pelaku industri sawit yang merupakan rakyat kecil mesti dapat

dilindungi keekonomiannya sehingga tidak berdampak pada kebijakan pemerintah.

"Saya masih berharap, teman-teman di DPR mulai terbuka untuk mendukung terbentuknya pansus minyak sawit ini. FPKS sudah pernah mengusulkan pansus minyak goreng, namun belum mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain secara legal. Pansus minyak sawit ini sangat penting karena akan mengurai persoalan minyak goreng secara terang benderang", jelas Akmal.

Legislator asal Sulawesi

Selatan II ini sangat menyayangkan di beberapa wilayah, minyak goreng membuat masyarakat tidak dapat membeli karena harga yang tinggi. Bahkan minyak curah pun harganya melambung tinggi.

"Saya memperhatikan, beberapa orang yang ingin berbagi minyak goreng di moment ramadhan ini juga kesulitan untuk mendapat minyak goreng karena harga tinggi. Niat masyarakat yang berkemampuan ini ingin membeli minyak goreng yang



**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Saya masih berharap, teman-teman di DPR mulai terbuka untuk mendukung terbentuknya pansus minyak sawit ini. FPKS sudah pernah mengusulkan pansus minyak goreng, namun belum mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain secara legal. Pansus minyak sawit ini sangat penting karena akan mengurai persoalan minyak goreng secara terang benderang"

banyak untuk dibagikan ke tetangganya akhirnya tidak jadi dilakukan. Saya secara pribadi, mendukung apapun kebijakan pemerintah terhadap minyak

goreng, yang penting harga balik normal dan petani sawit rakyat tidak merugi", tutup Andi Akmal Pasluddin.

# Aleg PKS Nilai Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Rugikan Petani Sawit

## KUTIPAN

Jakarta (26/04) --- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai pengumuman Presiden RI mengenai pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng langsung menimbulkan konflik petani sawit dengan perusahaan kelapa sawit.

Hal ini, kata Johan, disebabkan di berbagai daerah sentra produksi sawit telah menetapkan harga beli TBS (tandan buah segar) secara sepihak, yang merugikan petani sawit. "Pengumuman Presiden ini langsung berdampak merugikan petani sawit sehingga memunculkan masalah baru dan tidak menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air, hal ini patut disayangkan karena petani menjadi korban dari rencana kebijakan ini," tukas Johan.

Politisi PKS ini juga menilai pemerintah tidak konsisten dalam memberlakukan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dengan

menjadikan CPO tidak termasuk ke dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

"kita mempertanyakan apa tujuan pelarangan ekspor yang hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein, sementara dampak dari rencana ini malah berakibat buruk bagi petani sawit.

"Efek dari kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan meroketnya harga minyak goreng di tanah air, malah menjadi ancaman bagi pendapatan petani sawit yang jumlahnya mencapai 3 juta kepala keluarga," ucap Johan.

Johan menyayangkan rencana kebijakan yang tidak fokus untuk mengatasi

melambungnya harga minyak goreng dan malah merugikan petani sawit.

"Seharusnya Pemerintah menggunakan paradigma kebijakan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik baru sisanya diekspor karena persoalan utama dari melambungnya harga minyak goreng adalah kelangkaan CPO di dalam negeri akibat terus diekspor. Kebutuhan CPO di dalam negeri itu kan sekitar 17,35 juta ton namun yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hanya ada sekitar 9,79 juta ton saja, karena CPO yang kita ekspor mencapai 37,39 juta ton, inilah harusnya persoalan utama yang mesti segera diatasi pemerintah," tegas Johan.

Wakil Rakyat dari Dapil NTB 1 ini menilai tidak ada gunanya melarang ekspor bahan baku minyak goreng hanya terbatas pada RBM palm oil dan tidak melarang ekspor CPO.

"Pemerintah harus sadar bahwa saat ini kebutuhan CPO dalam negeri hanya menjadi sisa dari ekspor yang berim-



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI

"Seharusnya Pemerintah menggunakan paradigma kebijakan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik baru sisanya diekspor karena persoalan utama dari melambungnya harga minyak goreng adalah kelangkaan CPO di dalam negeri akibat terus diekspor."

pikasi kelangkaan CPO dalam negeri, jadi rencana kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air" sesal Johan.

Johan berharap Pemerintah memiliki keberpihakan pada petani sawit dan jangan tunduk pada keinginan pelaku pasar, menurutnya negara harus hadir untuk mengutamakan kepenting-

ngan domestik sampai harga minyak goreng kembali normal.

"Saya menilai pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng namun terus membolehkan ekspor CPO merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pasar global," demikian tutup Johan Rosihan.

# PROGRAM UNGGULAN

FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Keadif Anakif Substantif*



Menghidupkan kecintaan pelajar pada ilmu, ulama, pesantren serta khasanah pengetahuan Islam dari sumbernya yang original dan otentik.

LBKK pertamakali diselenggarakan oleh Fraksi PKS pada tahun 2016, dan diikuti oleh sekitar 1.300 orang santri dan lulusan pesantren. Berturut-turut LBKK terus dilakukan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Tahun ini peserta yang terdaftar hingga saat ini mencapai sekitar 2.538 orang.

# Anggota FPKS Minta Pemerintah **Pastikan Layanan Terbaik** dalam Mudik Lebaran 2022

## KUTIPAN

Jakarta (17/04) — Pemerintah resmi mengumumkan libur dan cuti bersama Idul Fitri dan Lebaran 2022. Periode libur lebaran yakni pada tanggal 29 April sampai 6 Mei 2022.

Pasca pengumuman tersebut, diperkirakan jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat menjadi 85,5 juta orang melalui darat, laut dan udara.

Untuk darat, seperti janji Menteri PUPR dalam Raker dengan Komisi V DPR RI tanggal 6 April 2022, semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai pada H-10 Lebaran.

"Tentunya hal ini harus didukung oleh layanan pengaduan secara daring bilamana ditemukan jalan-jalan yang rusak ataupun kemacetan karena pasar tumpah dan lainnya", terang Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS.

Hamid menambahkan, "Kemudahan mudik yang menjadi kerinduan masyarakat

karena sudah 2 tahun dilarang mudik ini juga harus didukung pelayanan tes antigen 1x24 jam atau tes PCR 3x24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. Layanan tes tersebut diharapkan dapat gratis dengan menggunakan CSR BUMN sebagai alternatif di samping program mudik gratis."

"Berdasarkan survei Kemenhub tentang potensi pergerakan orang pada Lebaran 2022, terlihat bahwa Jawa Tengah merupakan daerah tujuan terbesar dari pergerakan orang selama aktivitas mudik. Namun selain daripada itu, beban Jawa Tengah juga lebih besar lagi karena merupakan daerah perlintasan atau transit menuju Di Yogyakarta maupun Jawa Timur dan Bali ataupun

menuju Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera dari arah sebaliknya," kata Hamid yang merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Jateng IV.

Hamid juga mengapresiasi program mudik gratis dari Kemenhub menggunakan 270 bus untuk 8.100 penumpang dengan tujuan 14 kota di Jawa Tengah, di antaranya Kota Wonogiri.

Namun demikian, Hamid tetap meminta "Kemenhub menjaga agar jangan sampai harga tiket bus Lebaran meningkat berkali-kali lipat, sehingga membebani masyarakat," pesan Hamid.

Hamid juga minta Pemerintah dapat mengingatkan pengelola jalan tol agar selalu siap menyediakan layanan rest area yang layak dan bersih dan menambah jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrian panjang. Pemerintah dapat menambah rest area TIP C yang hanya dioperasikan pada masa libur panjang, sebab di sepanjang



**Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M.**

Anggota Komisi V DPR RI

"Kita berharap pelayanan selama arus mudik secara tahunan dimasukkan menjadi salah satu SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol. Dengan demikian diharapkan pengelola jalan tol dapat selalu meningkatkan pelayanannya terutama pada saat adanya kegiatan mudik"

jalan tol Jawa Tengah belum terdapat TIP C.

"Kita berharap pelayanan selama arus mudik secara tahunan dimasukkan menjadi salah satu SPM (Standar

Pelayanan Minimal) Jalan Tol. Dengan demikian diharapkan pengelola jalan tol dapat selalu meningkatkan pelayanannya terutama pada saat adanya kegiatan mudik," tutup Hamid

# Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Aleg PKS: Harus Audit Investigasi

## KUTIPAN

Jakarta (26/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi jadwal operasional proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta Bandung yang kembali mengalami kemunduran menjadi pertengahan tahun 2023.

Sebelumnya, kata pria yang akrab disapa SJP, jadwal operasional ini telah mengalami beberapa kali kemunduran, mulai dari tahun 2019 kemudian menjadi tahun 2021, lalu menjadi tahun 2022 dan terakhir menjadi tahun 2023.

"Selain jadwal yang mundur proyek kereta cepat ini juga mengalami pembengkakan biaya, dimana semua diperkirakan akan menelan biaya sekitar Rp 84,9 triliun sekarang diprediksi membengkak sekitar 27% atau Rp 24 triliun menjadi sekitar Rp 108,9 triliun," terang SJP.

Beberapa kendala, kata SJP, yang menyebabkan kemunduran jadwal dan pembengkakan biaya ini diantaranya adalah biaya pengadaan lahan yang memakan porsi cukup besar,

persoalan geologis pada saat pembuatan tunnel dan biaya penggunaan frekuensi GSM-R untuk komunikasi kereta cepat serta beberapa masalah lainnya.

"FPKS melihat semua persoalan ini disebabkan karena kurang matangnya perencanaan yang dibuat akibat adanya unsur ketergesaan pada awal membuat keputusan tentang proyek kereta cepat ini. Dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh filosofi Presiden Jokowi sendiri yaitu kerja, kerja, kerja sehingga proses perencanaan yang tidak terlihat secara kasat mata sebagai suatu bagian dari kerja menjadi sedikit terabaikan," jelas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kurang baiknya perencanaan ini, imbuh SJP,

terlihat dari belum masuknya penggunaan frekuensi GSM-R ke dalam anggaran awal serta adanya masalah geologis yang tidak terprediksi secara akurat membuktikan kurangnya pemetaan yang dilakukan.

"Sebagai akibat dari terjadinya kemunduran jadwal dan pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat ini muncul masalah permodalan, dimana kondisi keuangan dari BUMN saat ini juga belum begitu bagus akibat banyaknya penugasan dan adanya pandemi Covid-19," ujarnya.

Sehingga, kata SJP, Pemerintah terpaksa mengucurkan dana PMN dari APBN kepada PT.KAI sebesar Rp 6,9 triliun pada Desember 2021 yang sebagian dananya digunakan untuk pembiayaan proyek kereta cepat tersebut. Padahal pada awal proyek ini bergulir Pemerintah juga telah menjanjikan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan APBN.

"Karena adanya penggunaan APBN pada proyek ini, maka FPKS meminta agar Pemerintah melalui BPKP segera menuntaskan audit terhadap proyek kereta cepat ini. Agar segera terungkap



## H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T

Anggota Komisi V DPR RI

"FPKS melihat semua persoalan ini disebabkan karena kurang matangnya perencanaan yang dibuat akibat adanya unsur ketergesaan pada awal membuat keputusan tentang proyek kereta cepat ini. Dimana hal ini dapat dipengaruhi oleh filosofi Presiden Jokowi sendiri yaitu kerja, kerja, kerja sehingga proses perencanaan yang tidak terlihat secara kasat mata sebagai suatu bagian dari kerja menjadi sedikit terabaikan

menjadi terjadi pembengkakan biaya hingga mencapai sekitar 27% dari rencana awal, terutama pada biaya pengadaan lahan perlu

ditelusuri apakah ada mafia tanah yang terlibat didalamnya," ungkap SJP.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Jelang Hari Raya, Aleg PKS Minta Perbaikan Jalan Pantura Rampung Lebih Cepat

## KUTIPAN

Tasikmalaya (14/04) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Toriq Hidayat mengaku lega karena Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan berupaya supaya semua perbaikan jalan di Jalur Pantura selesai pada H-10 Lebaran. Namun Politisi PKS ini berharap rekonstruksi jalan Pantura sebaiknya rampung lebih cepat.

“Kementerian PUPR berjanji perbaikan jalur Pantura kelar dengan cepat. Targetnya selesai H-10 Jelang hari raya. Upaya ini tentu saya apresiasi. Namun jangan lupa, sebagian pemudik diperkirakan akan memulai mudik pada H-14. Oleh karenanya penyelesaian rekonstruksi jalan di wilayah utara ini harus lebih cepat lagi,” katanya.

Kemudian Toriq meminta Pemerintah supaya memastikan rute di wilayah utara ini aman dilalui kendaraan yang akan mudik. Karena ada beberapa

titik yang tercatat memiliki angka kecelakaan yang tinggi. Sehingga Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) diharapkan memperhatikan titik-titik tersebut.

“Informasi dari kepolisian wilayah Pantura, Kecelakaan umumnya diakibatkan oleh kondisi jalan dan minimnya rambu lalu lintas. Titik rawan diantaranya jalur Pantura Cirebon di Jawa Barat, jalur Rembang dan Demak di Jawa tengah, kemudian jalur tuban dan Situbondo di Jawa Timur.

Titik-titik tersebut harus menjadi perhatian kementerian terkait,” tuturnya.

Menurut Toriq, dari data yang didapatnya, kasus kecelakaan lalu lintas di Jalur Pantura berupa kecelakaan tunggal dan menabrak dari belakang. Kondisi jalan yang cenderung lurus, dan lebar membuat pengemudi bisa memacu kecepatan tinggi. Namun saat berjumpa Kondisi jalan bergelombang atau berlubang, pengemudi hilang kendali.

“Terutama malam hari, jarang penerangan jalan dan minimnya rambu lalu lintas menjadi kontribusi terjadinya kecelakaan di Pantura. Untuk itu perlu adanya penanganan yang baik dari semua pihak. Saya juga menghimbau kepada para pengguna jalan pantura agar tetap berhati-hati dan tetap waspada saat berkendara,” tutupnya.



**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**

Anggota Komisi V DPR RI

“Informasi dari kepolisian wilayah Pantura, Kecelakaan umumnya diakibatkan oleh kondisi jalan dan minimnya rambu lalu lintas. Titik rawan diantaranya jalur Pantura Cirebon di Jawa Barat, jalur Rembang dan Demak di Jawa tengah, kemudian jalur tuban dan Situbondo di Jawa Timur. Titik-titik tersebut harus menjadi perhatian kementerian terkait”

# 75% Pemudik Lewat Darat, Aleg PKS: Kemacetan dan Kecelakaan Diprediksi Meningkat

## KUTIPAN

Jakarta (18/04) --- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengingatkan pemerintah mengenai kemungkinan kemacetan parah dan peningkatan angka kecelakaan pada mudik Lebaran 2022.

Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pemudik melalui jalur darat yang diprediksi mencapai 60,47 juta penumpang (75% dari total pemudik).

"Jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ini adalah pertama kali pemerintah memperbolehkan mudik setelah pandemi covid. Dan dari 79,4 juta pemudik tahun ini, sekitar 75% nya (60,47 juta pemudik) akan menggunakan transportasi darat." Kata Sigit yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Timur (Dapil Jatim) I.

Tingginya angka pemudik yang akan menggunakan jalur darat, kata Sigit, berpotensi

memperketat pemeriksaan kelaikan angkutan umum yang akan digunakan sebagai angkutan lebaran.

Menurutnya, soal keselamatan dan keamanan angkutan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan mudik.

Berdasarkan data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sejak tahun 2018-2021, 65% dari total kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Sedangkan faktor sarana menyumbang 33% penyebab kecelakaan dari total yang diinvestigasi KNKT.

"Selain kelancaran mudik, keselamatan juga harus diperhatikan. Karena itu, setiap kendaraan yang akan digunakan mudik harus benar-benar laik jalan. Apalagi data KNKT 35% kecelakaan disebabkan karena sarana atau kendaraan yang tidak laik. Ini menjadi catatan dan tugas Kemenhub untuk memastikan kendaraan mudik laik jalan. Jangan sampai ada yang KIR nya bodong, jadi pemeriksaannya harus diperketat khususnya untuk angkutan umum," Kata Sigit.

menyebabkan kemacetan parah dan kecelakaan lalu lintas. Terlebih jika pemerintah abai mengawasi kelaikan sarana transportasi.

Karena 75% pemudik diprediksi menggunakan angkutan darat, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas juga bisa naik. Terlebih jika aspek keselamatan, khususnya untuk angkutan umum diabaikan, bisa-bisa berujung kecelakaan" Kata Sigit yang juga Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI.

Karena itu, Sigit mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk



**Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO**

Anggota Komisi V DPR RI

"Selain kelancaran mudik, keselamatan juga harus diperhatikan. Karena itu, setiap kendaraan yang akan digunakan mudik harus benar-benar laik jalan. Apalagi data KNKT 35% kecelakaan disebabkan karena sarana atau kendaraan yang tidak laik"

Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memetakan sejumlah titik di mana lalu lintas diprediksi akan mengalami perlambatan dan kemacetan selama masa mudik Lebaran 2022. Sejumlah area di mana lalu lintas diprediksi akan mengalami perlambatan atau kemacetan yakni di pintu

masuk tol, rest area, pom bensin, dan tempat-tempat lainnya.

Sedangkan sejumlah titik di mana diprediksi akan terjadi kepadatan yaitu Jalur tol Tangerang-Merak Km 26, Jalur Tol arah Cikampek Km 48-60, KM 31-37, Km 70-72, dan untuk arus balik di Km 54

Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng

# Aleg PKS: Bukan Solusi, Perlu Dievaluasi!

**KUTIPAN**

Kebijakan ekspor, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur.

Jakarta (24/04) — Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per 28 April 2022 mendatang menandai kontroversi, pasalnya menurut Anggota DPR RI asal Aceh Rafli, kebijakan itu bersifat emosional jangka pendek, sudah dipraktikkan pada larangan batu bara dan hasilnya merugikan.

"Bukan solusi, perlu di evaluasi. Kasusnya serupa kebijakan Stop ekspor batu bara, sangat terkesan emosional, akhirnya rugi. Bila kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Jangan sampai Larangan kebutuhan ekspor Minyak Goreng mengakibatkan kerugian" Tandas Rafli, Minggu (24/04)

Lebih mendesak saat ini menurut Politisi PKS itu, "Pemerintah perlu mengkomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh" ungkapnya

Data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton, sebanyak 5.07 ton (25,05%) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15,55 juta ton (74,93%) di ekspor. Berdasarkan presentase tersebut surplus produksi sangat besar.

Kebijakan ekspor, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur.

Hal tersebut sudah dipraktikkan negara tetangga Malaysia, mereka penghasil CPO kedua di dunia, dengan harga minyak goreng Rp 8.500/kg. Bandingkan, Indonesia sebagai penghasil minyak goreng no 1 dunia, harga relatif lebih mahal.

Sebagai legislatif di Komisi VI, Rafli menyarankan "Sebaiknya kita duduk bersama dulu dengan para produsen minyak goreng untuk evaluasi kebijakan ini, bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa." Tegasnya

Senada itu ia juga, mengusulkan "Untuk menjaga stabilitas harga, setiap Daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Disisi lain ada 3 Perusahaan besar BUMN tbk penghasil minyak goreng, semestinya Pemerintah mampu bikin harga lebih murah" Tutupnya

**RAFLI**

Anggota Komisi VI DPR RI

"Untuk menjaga stabilitas harga, setiap Daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Disisi lain ada 3 Perusahaan besar BUMN tbk penghasil minyak goreng, semestinya Pemerintah mampu bikin harga lebih murah"

# Politisi PKS Minta Pemerintah **Usut Tuntas** Minyak Goreng Sampai Harga Kembali Normal

## KUTIPAN

Padang (22/04) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, sangat kaget dengan status tersangka Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pada kasus minyak goreng.

Nevi mengatakan, bahwa kejadian terlibatnya moral hazard yang langsung dilakukan pejabat tinggi kemendag menjadi langkah awal yang perlu terus ditindaklanjuti.

Namun demikian, disisi lain penetapan status tersangka pejabat Kemendag justru menjadi ironi bagi Kementerian Perdagangan yang diharapkan masyarakat bisa menyelesaikan persoalan kasus minyak goreng yang mahal dan menyulitkan rakyat Indonesia.

"Dalam waktu dekat, kemendag mesti dipanggil DPR RI. Ini penting dilakukan sebagai upaya untuk membuat tindakan yang lebih agresif untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng yang sudah 7

bulan lebih harganya melangit. Penangkapan tersangka-tersebut ini mesti ada tindakan lanjutan sehingga harga minyak goreng di masyarakat kembali normal", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengingatkan, bahwa FPKS sudah pernah mengusulkan pansus minyak goreng.

"Semestinya seluruh anggota DPR dapat memahami maksud ini agar semakin terang benderang persoalan minyak goreng dapat di urai dan tujuan akhirnya demi rakyat Indonesia dapat mengakses minyak goreng dengan harga wajar," ungkap Nevi.

Nevi mengatakan, saat ini momentum pemerintah untuk

menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi mafia yang beredar di sekitar tata niaga sawit. Hingga saat ini, Negara telah memberikan izin tanah negara dikelola oleh pengusaha sawit seluas 14,4 juta hektar.

"Fraksi PKS tetap konsisten menyuarakan dan mengajak teman-teman di DPR-RI untuk membentuk Pansus Hak Angket tentang Kasus mahalnya Minyak Goreng ini, untuk membuka tabir apa yang terjadi dibalik tingginya harga minyak goreng dalam jangka waktu yang sangat lama. Secara konstitusi, ini lebih progresif bila dibandingkan tanpa ada pansus untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng", tutup Nevi Zuairina.



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Fraksi PKS tetap konsisten menyuarakan dan mengajak teman-teman di DPR-RI untuk membentuk Pansus Hak Angket tentang Kasus mahalnya Minyak Goreng ini, untuk membuka tabir apa yang terjadi dibalik tingginya harga minyak goreng dalam jangka waktu yang sangat lama. Secara konstitusi, ini lebih progresif bila dibandingkan tanpa ada pansus untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng",



# Legislator PKS: Krisis Minyak Goreng Tak Layak Terjadi di Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (24/04) --- Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Amin AK memberikan pandangannya dalam PKS Legislative Corner yang bertajuk 'Bongkar Habis Mafia Minyak Goreng', pada Jumat (22/04) siang.

"Urusan terkait minyak goreng ini adalah urusan barang yang terlihat. Urusan yang nyata. Ketika kita semua berbicara minyak goreng, kita berbicara sesuatu yang terlihat, bukan makhluk halus. Semuanya terlihat, sejak pemberian izin, penerbitan HGU, dimana tempatnya, pabriknya, distribusinya bagaimama, siapa distributornya, semua itu sesuatu yang terlihat dan berlangsung bertahun-tahun. Mestinya ini semua diketahui oleh pemerintah. Dan menjadi tanda tanya yang besar, ketika kita krisis minyak goreng dari November 2021, tersangkanya baru ditetapkan baru baru ini. Seharusnya, krisis ini tidak layak terjadi di Indonesia," ujar Amin.

Amin mengatakan carut marut krisis minyak goreng ini

memang terjadi karena dua pihak, yaitu pertama orang yang punya kewenangan, memiliki regulasi, dan seharusnya menegakkan regulasi tersebut. Kedua, adalah kemauan dari pelaku usaha.

"Kejadian ini adalah dosa besar bagi pejabat publik, karena pejabat publik ini memiliki peran yang sangat besar. Tanpa adanya peran dari pejabat publik ini, krisis carut marut minyak goreng ini tidak akan terjadi. Tidak akan terlaksana. Ini memang ironi buat kita semua," ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Amin juga mengingatkan bahwa beberapa waktu yang lalu, pada salah satu rapat bersama Komisi VI DPR RI, pejabat publik ini pernah menyatakan bahwa akan ada

tersangka yang bertanggungjawab atas krisis minyak goreng yang terjadi. Ternyata, beberapa waktu kemudian, yang ditetapkan menjadi tersangka adalah pejabat publik tersebut.

"Kondisi ini sungguh menyakitkan kita semua. Pejabat publik yang seharusnya menegakkan aturan, malah berkolusi dengan pelaku usaha, dengan mafia yang menyebabkan jutaan orang menderita, bahkan ada yang merenggang nyawa," sesal legislator kelahiran Kebumen ini.

Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini juga mengingatkan pemerintah untuk tetap selalu amanah dalam menjalankan konstitusi yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada mafia.

"Saya juga berharap untuk teman teman di DPR RI, untuk bersama-sama setuju menggunakan hak angket, membentuk pansus angket untuk menangani krisis minyak goreng ini. Semoga krisis ini segera berakhir, dan semua yang bermain dalam krisis ini bisa segera diungkap." tutup Amin.



**AMIN AK,M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI

"Urusan terkait minyak goreng ini adalah urusan barang yang terlihat. Urusan yang nyata. Ketika kita semua berbicara minyak goreng, kita berbicara sesuatu yang terlihat, bukan makhluk halus. Semuanya terlihat, sejak pemberian izin, penerbitan HGU, dimana tempatnya, pabriknya, distribusinya bagaimama, siapa distributornya, semua itu sesuatu yang terlihat dan berlangsung bertahun-tahun"



# Wakil Ketua FPKS: Menteri ESDM Jangan Resahkan Rakyat dengan Isu Kenaikan Harga BBM

## KUTIPAN

Jakarta (16/04) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, ingatkan Menteri ESDM Arifin Tasrif jangan latah ikutan meneror masyarakat dengan isu kenaikan harga BBM dan gas LPG 3 kilogram.

Mulyanto meminta Menteri ESDM jangan mengeluarkan wacana yang bisa membuat masyarakat panik. Sebab hingga saat ini pemerintah dan DPR sama sekali belum pernah membahas rencana kenaikan harga BBM dan gas tersebut.

"Padahal baru saja mahasiswa demo yang salah satu tuntutananya adalah soal BBM. Ini artinya Pemerintah sangat tidak peka," ujar Mulyanto.

Hal tersebut dikatakan Mulyanto usai mengikuti rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Rabu 13/4/2022.

"Dalam Raker tersebut, Menteri ESDM menyatakan, bahwa dalam jangka menengah

dan panjang memiliki strategi untuk penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas melon 3 kg. Terhadap pemaparan tersebut masyarakat harus tetap tenang, karena ini baru strategi Kementerian ESDM dalam jangka menengah dan panjang, bukan strategi jangka pendek," ungkapnya.

Dalam terminologi Bappenas, strategi jangka pendek bersifat tahunan, sementara strategi jangka menengah itu bersifat lima tahunan.

"Juga yang dipaparkan Menteri ESDM dalam Raker tersebut adalah sebuah strategi umum, bukan sebuah rencana, apalagi sebuah usulan konkret kepada DPR," terang Mulyanto.

Itu sebabnya, kata Mulyanto, tanggapan Komisi VII DPR RI secara umum datar-datar saja dan juga isu tersebut sama-sekali tidak masuk dalam kesimpulan rapat kerja. Umumnya bila suatu isu itu penting dan konkret, maka sudah pasti akan masuk dalam kesimpulan rapat.

"Kemudian, terkait dengan penyesuaian harga energi bersubsidi yang langsung menyentuh masyarakat luas seperti solar dan gas LPG 3 kg, ujung-ujungnya pertimbangan yang utama adalah dari Menteri Keuangan. Sampai hari ini statemen menteri keuangan adalah tidak akan menaikkan BBM tersebut, agar tidak terjadi market shock," ujar Mulyanto.

Pertimbangan Menteri Keuangan, ungkapnya, tentu akan lebih komprehensif, karena melihat bukan saja sisi pengeluaran, akibat defisit transaksi berjalan dari sektor migas.

"Tetapi juga sisi penerimaan negara karena mendapat durian runtuh dari kenaikan harga-harga komoditas ekspor, terutama



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

"Terkait wacana penyesuaian BBM Pemerintah harus menghitung dengan cermat kerentanan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di saat Pandemi Covid-19 yang belum usai ini, termasuk juga resiko politik seperti yang terjadi di Srilanka yang menuai krisis akibat kenaikan harga BBM dalam negeri"

batubara, CPO, tembaga, nikel, dll," jelas politisi PKS ini.

Tahun 2021 apalagi tahun 2022, kata Mulyanto, negara kita mendapat windfall profit

dari kenaikan harga-harga komoditas tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



Sebelumnya diberitakan pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga memprotes penetapan tersangka kasus ekspor CPO (minyak sawit) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kemenperin. Ia pun mengancam Kemenperin, bahwa pelaku industri minyak goreng akan mundur dari program subsidi bila kasus tersebut tidak diselesaikan.



## Menperin *Jangan Takut* Ancaman Pengusaha Minyak Goreng

Mereka berani mengancam karena tidak sadar akan penderitaan rakyat yang membesarkan mereka yang hampir enam bulan mengalami kelangkaan dan kemahalan migor,"



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III



# Aleg PKS Minta Kemenag Maksimalkan Kualitas Pelayanan dan Kuota bagi Calon Haji Indonesia

## KUTIPAN

Jakarta (20/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis meminta Kementerian Agama Republik Indonesia agar memaksimalkan kualitas layanan terhadap komponen Biaya Haji yang telah disepakati.

"Biaya Haji kita telah sepakati bersama yang mana Biaya Haji tahun 2022 ini memang ada kenaikan tetapi tidak akan ada penambahan biaya untuk pendaftar haji di tahun 2019 khususnya terkait Jamaah Haji Reguler setelah 2 tahun menunggu kepastian keberangkatan akibat Pandemi Covid-19. Alhamdulillah kita tekan terus biaya haji itu dari awal 45 juta hingga final ini yang kita sepakati adalah 39,8 juta," kata Iskan.

Dana yang sudah disetorkan oleh jema'ah, imbuhnya, diperjuangkan supaya tidak ada lagi penambahan dan pemerintah komitmen dengan adanya skema Virtual Account yang mana Biaya haji memang

naik akan tetapi tidak dibebankan kepada jemaah. "Ini buah perjuangan kami di DPR walaupun sebenarnya menurut hitungan saya pribadi, masih bisa turun sedikit lagi berkisar 300 - 500 ribu lagi yang bisa diambil dari komponen biaya penerbangan atau pembinaan haji. Oleh karena itu saya minta kepada Menteri Agama Republik Indonesia agar dapat semaksimal mungkin mengawasi dan meningkatkan kualitas layanan terhadap Biaya Haji tersebut untuk Jamaah kita. Mulai dari Akomodasi harus betul diperhatikan agar kenyamanan serta pelayanan bagi calon jamaah haji kita dapat memuaskan", ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Kementerian Agama harus memastikan terkait Kuota Haji yang akan diberikan kepada Calon Jamaah Haji Indonesia. "Terkait kuota Jamaah Haji Indonesia saya minta kepada Menteri Agama Republik Indonesia agar memastikan Kuota Jamaah itu atau 50 persennya dari kuota normal untuk dapat berangkat ke Tanah Suci pada Haji tahun ini," ujar Iskan.

"Walaupun masih 50 persen kuota yang akan didapat jemaah haji kita, saya mendorong pemerintah yaitu Kementerian Agama agar selalu berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk mengenai kuota jamaah haji ini. Kementerian Agama saya harapkan harus secepatnya dikejar terus kepada pihak dari Arab Saudi agar kuota jamaah Haji Indonesia bisa didapatkan secara maksimal sesuai dengan harapan kuota yang telah disepakati di dalam rapat kerja tersebut", tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan bahwa



## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Dapil Sumatera Utara II

"Walaupun masih 50 persen kuota yang akan didapat jemaah haji kita, saya mendorong pemerintah yaitu Kementerian Agama agar selalu berkoordinasi dengan pihak Arab Saudi untuk mengenai kuota jamaah haji ini"

pemerintah khususnya Kementerian Agama agar bekerja cepat untuk persiapan Haji tahun ini.

"Saya harapkan Kementerian Agama bekerja ekstra cepat guna memonitoring langkah-langkah yang taktis untuk persiapan

keberangkatan Haji tahun ini, mulai dari akomodasi penginapan di Saudi, konsumsi makanan serta protokol kesehatan seperti Tes PCR," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Kritik Keputusan Kemenag yang Hentikan Izin Baru PAUD-Rumah Tahfiz Alquran

## KUTIPAN

Jakarta (16/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf mempertanyakan keputusan Kementerian Agama menghentikan sementara pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQ) dan Rumah Tahfiz Alquran (RTQ).

Bukhori mengaku heran lantaran keputusan moratorium tersebut dilakukan saat bertepatan dengan bulan Ramadhan.

"Kenapa mesti moratorium? Banyak konstituen kami mempertanyakan alasan sesungguhnya dibalik keputusan itu. Apalagi moratorium tersebut dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga dinilai tidak tepat," ungkap Bukhori di Jakarta, Jumat (15/4/2022).

Legislator Dapil Jawa Tengah 1 ini mengatakan, keresahan konstituennya dapat dipahami mengingat bulan Ramadhan adalah momentum

mulia bagi umat Islam karena di bulan ini kitab suci Alquran diturunkan.

Dalam rangka memuliakan bulan tersebut, ujarinya, umat Islam berlomba-lomba mendekati diri dengan Alquran, baik dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, hingga ada sebagian masyarakat yang berminat belajar membacanya dari yang sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan Alquran. Semua itu dilakukan karena daya tarik Alquran dan keutamaan yang Allah janjikan terhadap hamba yang dekat dengan Alquran, terlebih

selama bulan Ramadhan.

"Dalam rangka menjaga syiar agama itu, tidak dimungkirkan bahwa akan ada umat Islam, baik yang terdiri dari ormas, yayasan, kelompok pengajian ataupun individu yang memanfaatkan gairah umat selama Ramadhan ini dengan menginisiasi upaya pelembagaan minat masyarakat terhadap Alquran melalui pendirian PAUD Alquran maupun Rumah Tahfiz Alquran untuk mengakomodasi minat mereka supaya lebih sistematis dan berkelanjutan," tuturnya.

Namun demikian, lanjut Bukhori, upaya mereka memperoleh legalitas berisiko terhalang dengan terbitnya kebijakan moratorium oleh Kementerian Agama yang tidak memberikan kepastian terkait tenggat waktu moratorium tersebut sehingga dikhawatirkan akan menghambat kegiatan umat Islam mensyiarkan Alquran.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

"Jika dalih Kemenag memorandum izin LPQ semata-mata demi penataan lembaga sekaligus penyempurnaan regulasi, maka semestinya bukan disetop secara total. Kebijakan ini semestinya bisa diperlakukan sama halnya dengan penyempurnaan regulasi setingkat UU. Apakah ketika ada suatu undang-undang yang sedang direvisi, hal itu membuat kekuatan hukum dari UU terkait berhenti berlaku selama proses revisi berlangsung?"



# Indonesia Negeri Banyak Bencana, HNW: Pemerintah Harus Perkuat BNPB Jangan Dihapus

## KUTIPAN

Jakarta (15/04) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengkritisi sikap Pemerintah yang menolak usulan Komisi VIII DPR RI agar mempertahankan dan memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tetap ingin menghapuskan nomenklaturnya dalam rencana Revisi UU Penanggulangan Bencana yang dibahas bersama Komisi VIII DPR RI.

Hal itu membuat pembahasan RUU Penanggulangan Bencana mengalami deadlock, dan akhirnya dihentikan pembahasannya di tingkat I pada Raker antara Komisi VIII DPR-RI dengan Pemerintah dan DPD RI, Rabu (13/4/2022).  
"Semua Rakyat Indonesia tahu bahwa Negara Indonesia disebut cincin api (ring of fire) sehingga terjadilah begitu banyak bencana alam. Sekarang dengan masih adanya

BNPB serta kewenangannya dalam UU, Indonesia masih belum mampu mitigasi apalagi atasi bencana-bencana alam dan non alam di Indonesia, apalagi kalau dihapuskan. Maka wajarnya, di tengah banyaknya bencana alam dan non-alam, yang terus terjadi sepanjang tahun di berbagai kawasan Indonesia, semestinya kelembagaan BNPB diperkuat, bukan malah diperlemah apalagi dihapuskan. baik

kelembagaan maupun sistem kerja dan anggarannya, misalnya dengan diturunkan statusnya dari keberadaannya dalam UU menjadi berada di level Perpres (Peraturan Presiden). Kami sangat prihatin dengan sikap Pemerintah tersebut, yang menunjukkan lemahnya komitmen dalam hal penanggulangan bencana," papar pria yang akrab disapa HNW.

PKS bersama semua Fraksi di Komisi VIII DPR, kata HNW, sepakat agar dengan revisi UU itu maka mestinya posisi BNPB diperkuat, baik dari struktur organisasinya, kewenangan dan anggarannya.

"Agar lebih mampu melaksanakan perannya menanggulangi bencana dan dampak-dampak sebagai perjemahan dari ketentuan Pembukaan UUDNRI 1945 yang mengharuskan hadirnya Pemerintah Indonesia untuk melindungi semua Rakyat Indonesia, termasuk melindungi mereka dari bencana-bencana," disampaikan Hidayat setelah Raker RUU Penanggulangan Bencana secara hybrid antara Komisi VIII DPR-RI dengan



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

"Agar lebih mampu melaksanakan perannya menanggulangi bencana dan dampak-dampak sebagai perjemahan dari ketentuan Pembukaan UUDNRI 1945 yang mengharuskan hadirnya Pemerintah Indonesia untuk melindungi semua Rakyat Indonesia, termasuk melindungi mereka dari bencana-bencana,"

Kemensos dan DPD RI, Rabu (13/04/2022).

Hidayat yang merupakan Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menilai, penjelasan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini bahwa kelembagaan penanggulangan bencana akan

dibuat lebih kuat dan fleksibel melalui Peraturan Presiden, justru bertentangan dengan kebutuhan di lapangan, apalagi dengan logika hierarki hukum yang berlaku di Indonesia.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Wakil Ketua FPKS Minta Pemerintah **Perhatikan** Kondisi Pemudik Anak-anak

## KUTIPAN

Jakarta (27/04) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani meminta Pemerintah agar memperhatikan kondisi pemudik anak-anak dalam perjalanan mudik Idulfitri tahun ini.

Menurut Netty, dari 85,5 juta calon pemudik, diantaranya tentu terdapat anak-anak yang perlu mendapat perhatian khusus.

"Anak-anak yang ikut mudik bersama orang tuanya perlu mendapat perhatian khusus karena mereka rentan terpapar penyakit atau keletihan. Pastikan di setiap terminal, stasiun, bandara maupun rest area yang disinggahi banyak pemudik agar tersedia tempat istirahat dan klinik kesehatan untuk kondisi darurat," katanya, Rabu (27/04).

Sebagai informasi, berdasarkan survey Kementerian Perhubungan RI menyebutkan akan ada sekitar 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan.

Untuk itu, Netty meminta para pemudik agar menyiapkan

perbekalan yang memadai untuk kebutuhan anak-anak. Khusus pemudik dengan kendaraan roda dua, Netty meminta agar berhati-hati membawa anak-anak.

"Cuaca, polusi udara dan kemacetan jalan tentu tidak cocok untuk anak-anak dibawa berkendara dengan motor. Sebaiknya jangan membawa anak mudik dengan motor. Apalagi didudukkan di depan. Itu sangat berbahaya," katanya.

Terkait prokes, Netty meminta pemerintah melakukan pengetatan pengawasan pada para pemudik.

"Pemerintah harus memastikan protokol kesehatan dijalankan secara disiplin oleh para pemudik. Awasi di tempat-tempat yang menjadi titik istirahat atau berhenti para pemudik seperti di rest area,

tempat makan, fasilitas publik dan sebagainya. Jangan sampai mudik tahun ini jadi titik balik peningkatan kasus Covid-19 di tanah air."

Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini juga meminta Satgas Covid-19 Pusat maupun daerah agar melakukan inspeksi rutin ke terminal, stasiun, bandara dan sejenisnya

"Terminal bis, stasiun kereta atau bandara tentu akan dipenuhi para pemudik. Mitigasi sedini mungkin potensi membeludaknya para pemudik di lokasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran prokes. Petugas maupun pengelola harus diedukasi agar turut menjaga prokes para penumpang," katanya.

Rute mudik pun, lanjut Netty, juga harus dipantau karena potensi terjadinya kemacetan dapat membuat penumpukan massa di titik-titik tertentu.

"Perlu dilakukan pengawasan kepada para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah dapat memberikan swab atau antigen gratis di titik-titik yang dilewati oleh para pemudik," tambahnya.

Netty juga mendorong agar



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

"Terminal bis, stasiun kereta atau bandara tentu akan dipenuhi para pemudik. Mitigasi sedini mungkin potensi membeludaknya para pemudik di lokasi tersebut agar tidak terjadi pelanggaran prokes. Petugas maupun pengelola harus diedukasi agar turut menjaga prokes para penumpang,"

pemerintah lebih intensif lagi dalam mengejar laporan kepatuhan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.

"Info dari Satgas Covid-19, masih banyak provinsi yang tidak rutin melaporkan

kepatuhan akan prokes di wilayahnya. Ini harus ditegaskan saat menghadapi libur Idulfitri dengan mobilitas masyarakat semakin tinggi," katanya.

Kunker ke Surabaya,

# Fikri Faqih Bertemu Forum Guru yang Sampaikan Aspirasi

## KUTIPAN

Surabaya (19/04) -- Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerjanya ke Surabaya, Jawa Timur bertemu dengan para guru yang tergabung dalam Forum Guru dan Tenaga Kependidikan.

Fikri mengatakan, sebanyak enam orang perwakilan guru datang langsung menyampaikan aspirasi dan bertanya soal isu pendidikan.

"Tadi pagi saya ditemui perwakilan GTK honorer dari Jatim dan Madura. Sebagian mereka yang sudah diterima sampai saat ini sedang menunggu SK dan yang sudah diterima tapi tidak ada formasi," ungkap Anggota DPR asal Dapil Jateng IX ini.

Fikri menambahkan ada sejumlah hal yang disampaikan Forum GTK diantaranya

Bagaimana mekanisme seleksi P3K tahap berikutnya dan bagaimana dengan nasib yang lulus namun belum mendapat formasi.

"Sejumlah perwakilan guru menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kejelasan mereka yang sudah lulus P3K namun tak jelas formasi penugasannya ke depan. Dan masih banyak pertanyaan yang disampaikan seputar isu tenaga kependidikan baik formasi, waktu kelulusan hingga kesempatan P3K mendatang," tutup Fikri.



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

“Ada sejumlah hal yang disampaikan Forum GTK diantaranya Bagaimana mekanisme seleksi P3K tahap berikutnya dan bagaimana dengan nasib yang lulus namun belum mendapat formasi. Sejumlah perwakilan guru menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kejelasan mereka yang sudah lulus P3K namun tak jelas formasi penugasannya ke depan. Dan masih banyak pertanyaan yang disampaikan seputar isu tenaga kependidikan baik formasi, waktu kelulusan hingga kesempatan P3K mendatang



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Salurkan*  
**ASPIRASI ANDA**  
**DI HARI ASPIRASI**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>

# Kunker BAKN ke Jawa Tengah, DPR Dengarkan Aspirasi Pengusaha Rokok

## KUTIPAN

Semarang (15/04) — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada Rabu (13/4/2022). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN terhadap LHP BPK terkait bea cukai.

Pertemuan dengan BAKN dihadiri oleh pemerintah daerah dan kantor wilayah bea cukai Kabupaten Kudus, serta para pengusaha rokok. Turut serta dalam rombongan BAKN, Anis Byarwati, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BAKN.

Dalam pertemuan ini, Anis menyampaikan tentang perubahan komposisi pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) yang akan diberlakukan mulai tahun depan seiring diberlakukannya UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang baru disahkan.

"Adanya fleksibilitas penggunaan dana untuk kesejahte-

raan masyarakat dan penegakan hukum membuat alokasi untuk bidang kesehatan berpotensi meningkat," ujar Anis.

Pada 2021, imbuhnya, Pemerintah mengalokasikan 25 persen DBH CHT untuk bidang kesehatan, yakni terkait penanganan dari dampak rokok terhadap kesehatan masyarakat. Lalu, terdapat alokasi 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat yang bersifat fleksibel dan 25 persen untuk penegakan hukum terkait rokok ilegal.

"Alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat mencakup 15 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku dan peningkatan keterampilan kerja, dalam

rangka alih profesi atau diversifikasi tanaman tembakau bagi petani tembakau. 35 persen lainnya untuk pemberian bantuan. Alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat berlaku fleksibel, sehingga dapat dialihkan ke bidang kesehatan jika anggaran telah melebihi kebutuhan daerah. Berbeda dengan alokasi dana untuk penegakan hukum yang bersifat baku atau tidak dapat dialihkan," pungkasnya

Pada tahun 2022, kata Anis, terdapat perubahan dimana alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dapat dialihkan ke bidang kesehatan.

Dalam kesempatan pertemuan ini, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mendengarkan aspirasi dari para pengusaha rokok yang menyampaikan bahwa produksi rokok mereka menurun drastis seiring dengan diberlakukannya kenaikan cukai rokok.

"Nyatanya, kenaikan cukai rokok menyebabkan masyarakat beralih mengonsumsi rokok ilegal. Hal ini meleset jauh dari tujuan diterapkannya kenaikan cukai



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Wakil Ketua BAKN DPR RI

"Produksi rokok mereka menurun drastis seiring dengan diberlakukannya kenaikan cukai rokok. Nyatanya, kenaikan cukai rokok menyebabkan masyarakat beralih mengonsumsi rokok ilegal. Hal ini meleset jauh dari tujuan diterapkannya kenaikan cukai rokok yaitu agar masyarakat berhenti mengonsumsi rokok. Dampak lain adalah maraknya produksi rokok ilegal. Hal ini akan menjadi perhatian dan masukan yang penting bagi kami"

rokok yaitu agar masyarakat berhenti mengonsumsi rokok. Dampak lain adalah maraknya produksi rokok ilegal. Hal ini

akan menjadi perhatian dan masukan yang penting bagi kami," tutup Anis.

# PKS Sebut Pemerintah akan Lakukan 2 Omnibus Lagi Usai UU PPP Sah

## KUTIPAN

Jakarta (16/04) --- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa mengatakan, pemerintah berencana melakukan omnibus lagi usai revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) disahkan.

Kedua omnibus law itu, yaitu: UU Sisdiknas dan UU di bidang keuangan. "Kalau ini jadi diundangkan (UU PPP), akan ada lagi omnibus keuangan, Undang-Undang Keuangan. Semua akan dijadikan satu dan sudah siap-siap di Komisi XI, Sisdiknas juga akan melakukan yang sama," kata Ledia dalam diskusi LP3ES secara daring, Jumat (15/4/2022).

Ledia mengingatkan pemerintah sebenarnya sudah melakukan metode omnibus lagi setelah UU Cipta Kerja. Ia sebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan metode omnibus law, tetapi tidak diperhatikan publik.

Menurut dia, PKS menolak UU Cipta Kerja saat itu karena metode omnibus tidak diatur

dalam perundang-undangan. Ia sebut PKS ingin agar metode omnibus digunakan bukan hanya untuk mengakomodir UU Cipta Kerja, tapi juga meningkatkan kualitas legislasi, kepastian hukum dan meningkatkan partisipasi publik.

Karena itu, kata Ledia, PKS memasukkan sejumlah syarat. Pertama, metode omnibus bisa dilakukan bila membahas satu topik tertentu. PKS meminta agar metode omnibus ditentukan sejak awal. Ia ingin penentuan omnibus atau tidak dilakukan di tahap perencanaan sehingga tidak ada tindakan perundangan di tengah jalan.

Kedua, PKS ingin agar ada alokasi waktu yang memadai dalam pembahasan undang-undang. Ia mencontohkan

bagaimana pembahasan undang-undang setidaknya membutuhkan 3 kali rapat dengar pendapat dengan 1 kali rapat mendengar 5 narasumber.

Pada kasus Undang-Undang Cipta Kerja, kata dia, pemerintah hanya mendengar 68 kali narasumber saja masih belum optimal dalam mendalami masalah-masalah dalam undang-undang, bahkan internal pemerintah masih belum selesai. Ketiga, PKS tidak sepakat jika undang-undang metode omnibus hanya dapat dicabut dengan metode omnibus.

Ia mencontohkan UU Cipta Kerja misalnya bisa merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi tidak bisa mengubah hal teknis. Ketika aturan di UU Cipta Kerja yang mengubah poin UU Ketenagakerjaan ingin direvisi, pemerintah harus merevisi UU Cipta Kerja. Keempat, PKS menolak rencana perbaikan undang-undang justru hanya antara DPR dan presiden.

Ia menilai ketentuan tersebut merusak marwah pembuat perundang-undangan. Selain itu, pembuat undang-



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI

"UU Sisdiknas dan UU di bidang keuangan. Kalau ini jadi diundangkan (UU PPP), akan ada lagi omnibus keuangan, Undang-Undang Keuangan. Semua akan dijadikan satu dan sudah siap-siap di Komisi XI, Sisdiknas juga akan melakukan yang sama"

undang bisa jadi lebih lalai dalam membuat undang-undang karena menilai regulasi tersebut bisa diperbaiki. Kelima, PKS ingin metode omnibus juga

mengakomodir pihak-pihak pro dan kontra.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Revisi UU PPP, Adang: Partisipasi masyarakat dalam Arti Luas **Harus Maksimal** dan Jangan Terburu-buru

## KUTIPAN

Jakarta (19/04) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS yang juga merupakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Adang Daradjatun menghadiri undangan wawancara Radio Idola - Semarang , mengenai pembahasan Revisi UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), pada Selasa (19/04).

Dalam penyampaianya, Adang menyebutkan bahwa Fraksi PKS melihat revisi UU PPP harus dilihat dari pemikiran yang luas, tidak sembarang dan mengutamakan kecepatan. Jadi kita mengkaji RUU ini dalam konteks makro, seperti saat kita melihat pembuatan UU Cipta Kerja yang telah disahkan lalu ditetapkan oleh MK sebagai “ cacat formil “.

PKS ingin kejadian pada pembuatan UU Cipta Kerja tidak terjadi lagi. Bagaimana 77- an

UU diubah hanya dalam waktu 3 bulan, pembahasan yang begitu cepat, RDPU dengan para pakar , masyarakat luas yang kurang dan berakibat pada banyak masalah, misalnya halaman yang salah, pengetikan yang salah.

Saya kira lembaga DPR RI , adalah lembaga yang terhormat , jika masih ada kesalahan penulisan dan kesalahan lainnya, saya kira ini tidak bagus”, ujar Mantan Wakapolri tersebut.

Kemudian, Adang menjelaskan bahwa fraksi PKS tidak memberi perhatian khusus mengenai perubahan kewenangan lembaga pemerintah dalam mengurus pendundangan UU.

“Berkaitan dengan Pasal 85, di mana dalam Pasal 85 UU PPP kewenangan pendundangan, dan sebagainya dilakukan oleh Kemenkumham, tetapi dalam Pasal 85 Revisi UU PPP , ada yang berubah menjadi kewenangan Kementerian Sekretariat Negara , itu bagian dari usul pemerintah.

Yang terpenting UU PPP yang baru nanti , dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal” , sesuai azas azas pembuatan suatu UU , jelas Adang.

Terakhir, Adang menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara hukum sesuai Konstitusi UUD 1945 , Pasal 1 ayat ( 3 ) oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum. Revisi UU PPP jangan sampai mengenyampingkan hukum dan



**Drs. H. ADANG DARADJATUN**  
Anggota Badan Legislasi DPR RI

“Fraksi PKS melihat revisi UU PPP harus dilihat dari pemikiran yang luas, tidak sembarang dan mengutamakan kecepatan. Jadi kita mengkaji RUU ini dalam konteks makro, seperti saat kita melihat pembuatan UU Cipta Kerja yang telah disahkan lalu ditetapkan oleh MK sebagai “ cacat formil”

didominasi kepentingan politik.

“Kita adalah negara hukum, jadi tidak bisa membahasnya dengan kecepatan dan melanggar hukum. Sikap PKS jelas, apapun Perbaikan harus jelas, berhubungan dengan bagaimana masyarakat dapat

ikut serta berpartisipasi dan juga bagaimana bagaimana nanti proses pembuatan UU melalalui mekanisme elektronik harus sudah siap persiapan sumber daya manusia, juga tentang hak anggota,

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota FPKS: PKS Menolak RUU PPP yang Mendegradasi Kedudukan DPR

## KUTIPAN

Jakarta (18/04) --- Anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menilai RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) berpotensi mendegradasi kedudukan DPR.

Bukhori merujuk pada Pasal 72 RUU PPP yang telah disetujui oleh DPR dan Pemerintah namun belum kunjung disahkan dalam rapat paripurna yang menyebut: "Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut".

Bukhori mengatakan rumusan tersebut mendegradasi posisi DPR selaku pembentuk undang-

undang karena dinilai melegitimasi kerja ugal-ugalan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Bukhori menegaskan bahwa DPR tidak boleh mengorbankan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar di masa mendatang hanya karena ingin mengakali UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Rumusan ini sebenarnya merendahkan marwah DPR karena terkesan membenarkan kerja asal-asalan dalam membuat peraturan perundang-undangan semisal UU Cipta Kerja sehingga kami tegas menentangnya. Dalam rapat panjang yang dihadiri oleh

perwakilan fraksi DPR dan Pemerintah, saya telah mengingatkan supaya pembahasan RUU tidak dilakukan secara tergesa-gesa serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) demi menghasilkan kualitas legislasi yang baik," ungkapnya di Jakarta, (18/04).

Bukhori mengaku khawatir praktik legislasi mendatang tidak mampu memberikan kepastian hukum akibat adanya rumusan baru tersebut. Oleh karena itu pihaknya sempat mengusulkan adanya pengaturan tentang alokasi waktu yang memadai untuk penyusunan RUU yang menggunakan metode Omnibus.

"Apakah DPR mau melegitimasi kerja asal-asalan? Sebaiknya kita cari slot waktu apabila tidak cukup waktu dalam pembahasan RUU supaya tidak tergesa-gesa. Memang apa yang mau dikejar? Bagaimana mungkin UU Ciptaker yang berdampak terhadap 78 UU hanya selesai dalam tiga kali masa persidangan? Tidak heran jika



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Badan Legislatif DPR RI

"DPR tidak boleh mengorbankan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar di masa mendatang hanya karena ingin mengakali UU yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK)."

pada akhirnya MK menyatakan UU ini inkonstitusional. Karena itu cukuplah UU Cipta Kerja menjadi preseden buruk bagi kualitas legislasi kita yang tidak boleh kembali terulang," tuturnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 mengatakan, paradigma Fraksi PKS

dalam memandang tujuan revisi UU PPP dengan memasukan rumusan metode Omnibus adalah untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih pada beberapa peraturan perundang-undangan eksisting.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**

# Adakan Media Gathering, Anis Byarwati **Apresiasi** Kerja Para Awak Media

## KUTIPAN

Pada kesempatan ini, anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan apresiasi kepada awak media atas kegigihan mereka dalam menyuarakan berita dan fakta yang benar.

Jakarta (20/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyelenggarakan acara Media Gathering bersama awak media. Acara yang dikemas dengan berbuka puasa bersama ini diselenggarakan dengan penuh kekeluargaan.

Pada kesempatan ini, anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan apresiasi kepada awak media atas kegigihan mereka dalam menyuarakan berita dan fakta yang benar.

Anis juga berterima kasih atas kerjasama yang telah dijalin selama ini. Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan awak media, sebaik apapun isu dan gagasan yang

disampainya tidak akan diketahui khalayak ramai.

"Awak media bagi saya tidak hanya sebagai mitra. Akan tetapi sudah seperti saudara," katanya.

Para wartawan diberikan waktu lebih banyak untuk memberikan masukan dan pandangannya terkait kerjasama dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

"Saya ingin mendengar lebih banyak masukan dari teman-teman wartawan untuk perbaikan kerjasama ke depannya," ujar Anis.

Menanggapi permintaan Anis, para wartawan memberikan berbagai saran dan masukan terkait respon isu yang perlu segera sesuai momentum, topik isu yang perlu

lebih luas dan sebagainya. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan kedekatan Anis terhadap para wartawan.

"Ibu Anis termasuk anggota dewan yang sangat mudah untuk kami hubungi," ujar salah seorang diantara mereka.

Acara ditutup dengan berbuka bersama dengan berkumandangnya adzan magrib. Dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi hangat informal.



**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Anis juga berterima kasih atas kerjasama yang telah dijalin selama ini. Ia menegaskan bahwa tanpa bantuan awak media, sebaik apapun isu dan gagasan yang disampainya tidak akan diketahui khalayak ramai.



# Kurniasih Bagi Takjil Gerakan 2 Juta Paket Sahur dan Takjil dari Jakarta Hingga Malaysia

## KUTIPAN

Jakarta (17/04) --- Anggota DPR RI Dapil Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati membagikan paket sahur dan takjil dari Jakarta hingga Malaysia.

Program ini adalah bagian dari tebar 2 juta paket sahur dan takjil yang diluncurkan PKS di seluruh Indonesia maupun luar negeri.

Kurniasih menyebut, program berbagi 2 juta sahur dan takjil serentak dilaksanakan oleh struktur PKS dari pusat hingga ranting termasuk bagi Legislator asal PKS.

Ia mengatakan, program ini bagian dari spirit PKS sebagai partai pelayan rakyat di tengah berbagai kesulitan masyarakat yang harus menerima konsekuensi naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

"Masyarakat kita ini sedang sulit, sedang menanah diri untuk bangkit dari hantaman Pandemi yang juga masih terjadi tapi sejak awal

tahun hingga Ramadhan ini yang diberikan ke masyarakat justru hilang dan mahalnya minyak goreng, kenaikan harga pertamax, kenaikan PPN yang dibebankan ke konsumen, mahalnya kebutuhan pangan termasuk sudah diwanti-wanti dengan kenaikan harga pertalite dan tabung gas elpiji 3 kg," ujar dia.

Sebab itu, papar Kurniasih, PKS melakukan gerakan pembagian 2 juta paket sahur dan iftar sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan.

"InsyAAllah semua struktur dan anggota PKS bergerak, kami yang diamanahkan mewakili masyarakat dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri bisa

membagikan paket ini ke masyarakat di tempat tersebut sampai ke Malaysia untuk teman-teman Pekerja Migran Indonesia bekerja dengan PIP PKS Malaysia," kata dia.

Terlebih momentum Ramadhan tahun ini bertepatan dengan Milad ke-20 PKS yang mengusung spirit 'Melayani Indonesia'.

"Ini bentuk syukur kami atas nikmat usia perjuangan dengan terus melayani Indonesia. Tidak akan berubah garis perjuangan PKS sebagai partai pelayan rakyat," kata dia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan struktur PKS khususnya di DKI Jakarta tepatnya di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan termasuk teman-teman PIP PKS di seluruh dunia yang terus melayani masyarakat Indonesia di berbagai belahan dunia," ujar Kurniasih menambahkan.



**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"InsyAAllah semua struktur dan anggota PKS bergerak, kami yang diamanahkan mewakili masyarakat dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri bisa membagikan paket ini ke masyarakat di tempat tersebut sampai ke Malaysia untuk teman-teman Pekerja Migran Indonesia bekerja dengan PIP PKS Malaysia"



# Bukhori Serahkan Bantuan 30 Ekor Sapi untuk Berdayakan Peternak di Dapil Salatiga

## KUTIPAN

Salatiga (25/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan tiga puluh ekor sapi kepada Kelompok Tani Ngudi Raharjo, Kauman Kidul, Salatiga, Jumat (22/4/2022).

Bantuan ini merupakan hasil advokasinya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang direalisasikan melalui program kemaslahatan BPKH.

Turut hadir dalam kegiatan serah terima bantuan antara lain Wakil Wali Kota Salatiga, Muhammad Haris, Direktur Program Darut Tauhid (DT) Peduli, M.Ihsan, selaku pendamping teknis program BPKH, serta Deputi Bidang Kesekretariatan dan Kemaslahatan BPKH Emir Rio Krishna yang hadir melalui zoom meeting.

Dalam kesempatan itu Bukhori menjelaskan alasan mengenai dipilihnya program ini untuk memberdayakan peternak di dapilnya.

“Program peternak

tangguh dapat memberikan multiplier effect karena tidak hanya peternak saja yang diuntungkan tetapi juga keluarganya, masyarakatnya bahkan industri di sekitarnya,” ujarnya.

Legislator PKS Dapil Jateng 1 ini menambahkan, Kota Salatiga dan sekitarnya dipilih sebagai proyek percontohan peternakan sapi karena daerahnya cocok dan didukung dengan adanya industri rumahan di Salatiga yang menggunakan bahan baku singkong.

“Sapi membutuhkan asupan makanan lain selain rumput dan padi kering. Untungnya, di sini banyak industri olahan singkong, salah satunya adalah kulit singkong yang bisa dimanfaatkan untuk

kan sapi,” ucapnya.

Bukhori menjelaskan, kendati berasal dari BPKH, dana yang dipakai untuk program pemberdayaan masyarakat ini dipastikan tidak bersumber dari dana haji. Selain itu, dia juga meminta doa restu agar bisa memperbanyak titik program pemberdayaan masyarakat ini.

“Ini bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat yang berasal dari hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai manfaat inilah yang digunakan untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Salatiga Muhammad Haris mengatakan, atas nama Pemerintah Kota Salatiga, dirinya mengapresiasi jasa pihak terkait atas dipilihnya Salatiga sebagai salah satu wilayah program pemberdayaan peternak tangguh.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I

“Program peternak tangguh dapat memberikan multiplier effect karena tidak hanya peternak saja yang diuntungkan tetapi juga keluarganya, masyarakatnya bahkan industri di sekitarnya”





# PKS Berhasil Desak Pertamina Bayar Kompensasi pada 338 Nelayan Kamal Muara

## KUTIPAN

Jakarta (24/04) --- Anggota Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto bersama jajaran pengurus Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS DKI Jakarta berhasil mendesak Pertamina membayar kompensasi kepada 338 nelayan korban kebocoran sumur Pertamina di Karawang.

Pembayaran kompensasi dilakukan setelah pihak Pertamina melakukan verifikasi data, analisis rekomendasi Walikota Jakarta Utara serta pengajian hasil analisis dampak lingkungan oleh tim Institut Pertanian Bogor (IPB).

Setelah semua tahapan dilakukan barulah Pertamina menyatakan bersedia membayar kompensasi kepada para nelayan sesuai besaran yang direkomendasikan.

Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Pertamina ke rekening bank para nelayan

mulai pekan ketiga April 2022.

Hingga Sabtu (23/4/2022) sudah 302 nelayan yang menerima pembayaran. Sementara sisanya masih harus memperbaiki data kependudukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemda Jakarta Utara.

"Kita patut bersyukur pada akhirnya Pertamina berkenan membayarkan kompensasi ini. Setelah kurang lebih tiga tahun kita bersama-sama mengawal masalah ini, akhirnya Pertamina bersedia memenuhi kewajiban-

nya," kata Mulyanto dalam sambutannya di acara tasyakuran Komunitas Nelayan Kamal Muara, Sabtu (23/4/2022).

Tasyakuran diadakan oleh nelayan sebagai ungkapan bahagia karena perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Hadir dalam acara tasyakuran tersebut para nelayan penerima dan kompensasi, Ketua DPD PKS Jakarta Utara, Mardono, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPW PKS DKI Jakarta, Kartika Kirana dan tokoh masyarakat setempat.

Sebelumnya Mulyanto beserta pengurus Bidang Tani dan Nelayan PKS DKI Jakarta dimintakan bantuan oleh nelayan Kamal Muara untuk memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina agar berkenan membicarakan soal kerugian yang dialami nelayan Kamal Muara.

Nelayan melaporkan selama ini sudah berusaha menghubungi berbagai pihak terkait agar masalah ini dapat diselesaikan. Tapi laporan tersebut tidak ditanggapi dengan baik. Akhirnya para nelayan mencoba minta bantuan Fraksi PKS DPR RI agar bersedia membantu. Oleh Fraksi PKS laporan ini diterima dan diteruskan ke anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, yang merupakan mitra kerja Pertamina.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

"Kita patut bersyukur pada akhirnya Pertamina berkenan membayarkan kompensasi ini. Setelah kurang lebih tiga tahun kita bersama-sama mengawal masalah ini, akhirnya Pertamina bersedia memenuhi kewajibannya"



# Serahkan Bantuan Pendidikan Anak Gaza, **Netty: Jangan Biarkan** **Perang dan Pandemi** **Rampas Hak Belajar Mereka**

## KUTIPAN

Bandung (25/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani bersama Komunitas Dua Generasi memberikan bantuan kepada para peserta didik kelas Alquran di Gaza, Palestina.

Bantuan tersebut merupakan bentuk empati pada anak-anak Gaza yang hidup dalam suasana perang dan pandemi. "Jangan sampai perang dan pandemi merampas hak belajar anak-anak Gaza. Ini menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai warga dunia untuk peduli pada sesama," kata Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial, Senin (25/04).

"Kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap masalah Palestina. Kita harus mengapresiasi dan mendukung sikap tegak lurus pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI yang dalam setiap kesempatan di panggung internasional menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri bersama Palestina sampai

mereka mendapatkan kemerdekaannya yang di rampas," imbuh Netty.

Pada acara penyerahan yang digelar pada Sabtu malam (23/04) Netty bersama Komunitas Dua Generasi juga melakukan dialog dengan Adara Relief Internasional dan NGO Assyatibi, sebuah lembaga pendidikan Alquran untuk anak-anak di Ghaza, Palestina.

"Isu Palestina harus terus disuarakan agar dunia tidak melupakan hak anak bangsa tersebut yang masih terjajah. Perang dan penjajahan pasti meninggalkan duka dan derita bagi anak-anak. Rasa aman, hak belajar dan hak hidup yang layak tentu banyak terenggut," katanya.

Netty juga mengingatkan,

Presiden Soekarno dulu pernah mengatakan bahwa selama Palestina belum merdeka, maka selama itu bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel.

"Konstitusi kita dengan tegas menolak setiap bentuk penjajahan di atas muka bumi. Oleh karena itu perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi yang harus kita tunaikan," tambahnya.

Pada kesempatan itu Netty juga menyampaikan kepada bangsa dan anak-anak Palestina untuk tetap tegar dan kuat melawan kekerasan Israel.

"Bangsa Palestina tidak perlu gentar dan takut melawan penjajahan, karena mereka tidak sendiri. Selain Indonesia, bangsa-bangsa lain di dunia juga akan berdiri tegak untuk membela kemerdekaan Palestina serta menentang kekerasan Israel," katanya.

Terakhir, Legislator dari Dapil Cirebon - Indramayu ini juga mengingatkan bangsanya Indonesia untuk belajar ketegaran dari bangsa Palestina.

"Dengan segala



**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPP PKS

"Kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap masalah Palestina. Kita harus mengapresiasi dan mendukung sikap tegak lurus pemerintah Indonesia melalui Kemenlu RI yang dalam setiap kesempatan di panggung internasional menyatakan bahwa Indonesia akan berdiri bersama Palestina sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya yang di rampas

pembatasan dan blokade, masyarakat Gaza tetap bersemangat menyiapkan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk anak-anak

mereka. Tentunya pemerintah dan masyarakat Indonesia harus lebih berdaya lagi dalam mendidik generasi" katanya.



# Maraknya Isu Penundaan Pemilu, Alifudin **Sampaikan** Pentingnya Pemahaman dan Komitmen Kebangsaan

## KUTIPAN

Pontianak (25/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dapil Kalbar 1, Alifudin kembali melakukan kegiatan sosialisasi empat pilar bersama anggota Persaudaraan Muslimah (Salimah) Kalimantan Barat di Aula SDIT al Mumtaz, Pontianak, pada Sabtu (16/04/2022) lalu.

Dalam Sosialisasi empat pilar kali ini, Alifudin kembali menekankan pentingnya pemahaman dan komitmen kebangsaan kepada anggota Salimah Kalbar.

"Keberlangsungan jalannya pemerintah dan kehidupan berbangsa kita, sangat bergantung dari pemahaman dan komitmen kita terhadap 4 pilar, yaitu bentuk negara kita yaitu negara Kesatuan, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika", jelas Alifudin di depan peserta sosialisasi 4 Pilar.

Salahsatu pentingnya pemahaman dari empat pilar akan menambah komitmen dan

ketaatan kita terhadap konstitusi dalam hal ini UUD 1945. Seperti contoh perodesasi kepemimpinan di negara.

Alifudin memberikan contoh terkait isu presiden 3 periode, yang bisa melanggar komitmen dalam konstitusi kita.

"Belakangan ini marak isu presiden 3 periode, hal ini dapat melanggar konstitusi yang berlaku, karena dalam UUD perodesasi untuk presiden hanya boleh 2 periode, atau 2 kali", ujarnya.

Alifudin berharap, Salimah dapat meneruskan dan menjelaskan tentang 4 pilar ini kepada anggotanya yang ada di

Kalbar.

Dwi Nugraheni, ketua PW Salimah Kalbar, yang turut hadir dalam acara sosialisasi 4 pilar tersebut, berterimakasih kepada Alifudin selaku anggota MPR RI yang menyediakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah kami berterimakasih, kepada pak Alifudin yang bisa hadir menjelaskan tentang 4 pilar kepada anggota Salimah Kalbar, kami berharap hal ini bisa terlaksana kembali pada tahun berikutnya", pungkasnya.



**H. ALIFUDIN, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

"Keberlangsungan jalannya pemerintah dan kehidupan berbangsa kita, sangat bergantung dari pemahaman dan komitmen kita terhadap 4 pilar, yaitu bentuk negara kita yaitu negara Kesatuan, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika"

# Bersama Bupati Bulukumba, Andi Akmal Pasluddin Resmikan Kantor DPD PKS

## KUTIPAN

Bulukumba (25/04) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sulawesi Selatan II, Andi Akmal Pasluddin meresmikan kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bulukumba.

Peresmian kantor ini juga didampingi Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf. Acara peresmian Kantor DPD PKS yang terletak di depan Masjid Agung Bulukumba ini, dirangkai dengan buka puasa bersama.

Selain anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Bupati Bulukumba, juga dihadiri Anggota DPRD Sulsel Isnayani, Anggota DPRD Bulukumba dari PKS serta segenap fungsionaris dan kader PKS Bulukumba.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada bupati Bulukumba yang turut hadir dan meresmikan kantor DPD PKS Bulukumba ini. Alhamdulillah, selama 20 tahun lebih PKS hadir di Bulukumba, banyak memberikan warna dan kontribusi kepada masyarakat,

baik pembangunan fisik maupun mental", tutur Akmal.

Diketahui, bahwa di hadapan puluhan kader PKS, bupati Bulukumba yang lebih akrab disapa Andi Utta ini, merefeksi kembali perjalanan singkatnya bersama partai pengusungnya itu di Pilkada 2020.

Andi Akmal mengatakan, bahwa di Pilkada kemarin, PKS mengusung Bupati terpilih saat ini meski hasil survei 1,4 persen di awal.

"Saya berharap, doa dan harapan pak Bupati dimana PKS akan menjadi partai besar dapat segera terealisasi, sehingga harus dijaga baik-baik. PKS juga akan benar-benar memikirkan aspirasi masyarakat dengan memberikan program yang bermanfaat", Urai Politisi PKS ini.

Legislator asal Sulawesi yang duduk di Komisi IV DPR ini menilai, Kantor PKS Bulukumba akan menjadi yang terbaik di Sulsel. Bukan hanya di Sulsel, tapi diharap dapat menjadi contoh di Sulawesi, bahkan kalau bisa di Indonesia.

"Tanahnya kita beli kurang lebih enam tahun lalu. Kita impikan kantor ini. Akhirnya terwujud. Insya Allah, saya akan terus berkontribusi," kata Akmal.

Mantan Ketua DPW PKS Sulsel ini, mengaku, bangga dengan kerja-kerja politik kader PKS Bulukumba, termasuk pencapaian target KTA (Kartu Tanda Anggota).

"Alhamdulillah, Bulukumba target pencapaian KTA terbaik. Kita harus terus percaya diri. Kita harus bisa nomor satu dengan kepercayaan diri dan kerja sama semua," ujarnya.

Akmal mengemukakan, yang paling utama dalam memenangkan PKS pada event politik ke depan adalah kerja keras dan kekompakan bersama.

"Kita harap dapat mengusul bupati sendiri. Tapi lebih utama bagaimana memenangkan PKS di 2024," tegas politikus asal Kabupaten Bone ini.



## Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulawesi Selatan II

"Saya berharap, doa dan harapan pak Bupati dimana PKS akan menjadi partai besar dapat segera terealisasi, sehingga harus dijaga baik-baik. PKS juga akan benar-benar memikirkan aspirasi masyarakat dengan memberikan program yang bermanfaat"



# Di Dapil, Nevi Zuairina Salurkan Puluhan Ribu Sembako untuk Warga Sumbar

## KUTIPAN

Padang (25/04) --- Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga Sumatera Barat di Daerah Pemilihannya.

Puluhan Ribu paket Sembako yang disalurkan Nevi tersebar di Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh.

"Alhamdulillah paket tersebar di Sumatera Barat termasuk membantu masyarakat yang terdampak bencana. Total sekitar paket sembako ini lebih dari sepuluh ribu paket menjangkau masyarakat di 8 kabupaten kota di Sumbar", tutur Nevi.

Politisi PKS ini mengatakan, Tim Sahabat Nevi Zuairina bergerak untuk menyalurkan bantuan termasuk bagi warga kenagarian kaji, Kec. Talamau dan sekitarnya

untuk warga yang menjadi korban gempa 6,2 SR pada 25 Februari 2022 lalu

Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, di penghujung Ramadhan 1443 H ini, ia terus menjalankan amanat partainya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni mengimplementasikan gerakan 2 juta paket terbuka. Namun untuk daerah bencana ini, ia menyalurkan langsung ribuan paket bantuan sembako kepada masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbuka dan sahur selama beberapa hari.

"Alhamdulillah tahun ini kita kembali menyalurkan paket sembako ke beberapa tempat di kabupaten Pasaman.

kegiatan ini, selalu dilaksanakan hampir setiap tahun, dan Alhamdulillah kali ini kita menyalurkan dengan jumlah sekitar 2200 paket bantuan sembako khusus di pasaman dan puluhan ribu untuk daerah-daerah lainnya," Terangnya istri Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2021.

Nevi menambahkan, bahwa banyak lembaga-lembaga yang membantu proses penyaluran sembako ini sehingga dapat cepat, lancar dan tepat sasaran. Ia berharap, dengan bertemunya secara langsung dengan masyarakat, dapat menjadikan informasi yang tepat terhadap keadaan sekitar sehingga ketika ada hal-hal yang dapat ditindak lanjut, dapat langsung tereksekusi.

"Saya terus berupaya berkolaborasi dengan masyarakat untuk memberi dan memperbaiki hal-hal yang perlu. Jika kita tidak mampu karena keterbatasan individu, akan dapat dikomunikasikan pada rapat-rapat di pusat agar ada regulasi yang baik demi perbaikan masyarakat di daerah", tutup Nevi Zuairina.



**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II

"Saya terus berupaya berkolaborasi dengan masyarakat untuk memberi dan memperbaiki hal-hal yang perlu. Jika kita tidak mampu karena keterbatasan individu, akan dapat dikomunikasikan pada rapat-rapat di pusat agar ada regulasi yang baik demi perbaikan masyarakat di daerah





# Dr. Salim: Posko Mudik PKS Layanan Nyata untuk Masyarakat



Jakarta -- PKS kembali meluncurkan posko mudik, kali ini posko mudik PKS dinamakan posko mudik Dr. Salim. Secara simbolik posko mudik Dr. Salim secara langsung diresmikan oleh Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim. Ketua Pelaksana Program Posko Mudik Dr. Salim, Yoyok Switchandoyo memaparkan posko mudik yang siap melayani

pemudik lebaran tahun ini berjumlah 125 posko. Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al Jufri mengatakan penyelenggaraan program Posko Mudik Dr. Salim di berbagai titik bukan sekadar tradisi yang dilakukan oleh PKS. "Saya ingin katakan kepada semuanya, bahwa Posko Mudik

2022 ini adalah sesuatu yang bukan sekadar tradisi yang kita lakukan, tapi yang kita inginkan semua dari hati yang paling dalam sebab bukti nyata itu sendiri yang akan dirasakan oleh masyarakat," ungkap Dr. Salim saat Launching acara Posko Mudik Dr. Salim



# Berkah Ramadhan, HNW Bagikan Puluhan Ribu Takjil dan Ratusan Bingkisan Lebaran

## KUTIPAN

Jakarta (25/04) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid hingga akhir Ramadhan 1443 H telah menyalurkan sekitar 20 ribuan paket berbuka puasa bagi masyarakat Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga kaum muslimin di beberapa negara seperti Malaysia dan Taiwan.

HNW sapaan akrabnya juga telah membagikan 660 bingkisan lebaran berisi sembako dan THR bagi para yatim, dhuafa, pengurus Masjid, Kyai, Ustadz/ah, dan Dai di Jakarta.

"Alhamdulillah, ini adalah bagian dari kontribusi kami untuk menyemarakkan Ramadhan dan turut menyukseskan program Partai Keadilan Sejahtera membagikan 2 juta takjil dan ifthar selama Ramadhan, sekaligus mengapresiasi para Merbot Masjid, Kyai dan Ustadz/ah yang telah melayani

dan memberikan bimbingan langsung kepada masyarakat. Semoga menguatkan kohesi sosial, ukhuwah Islamiyah dan menjadi ibadah yang berkahnya meluber untuk kebaikan Umat dan Bangsa," disampaikan Anggota DPR-RI Dapil Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri, di Jakarta, Senin (25/04).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini berpesan, dalam kegiatannya berbagi ifthar dan takjil bersama kaum muslimin Taiwan secara daring yang turut

diikuti oleh Diaspora Muslim Indonesia dari Jepang, UK, Qatar, Swiss, Brunei dll (24/4), agar bulan Ramadhan dan ibadah Puasa dapat meningkatkan motivasi untuk terus menerus berkreasi dan berprestasi dengan terus berbagi dan melayani masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun internasional, sebagai perwujudan taqwa dan bukti bahwa Islam memang agama yang rahmatan lil alamin.

Ketika menjelaskan Ayat Al-Qur'an tentang kewajiban puasa, HNW memaparkan bahwa Puasa merupakan bentuk tautan sejarah antara umat Islam hari ini dengan Umat-umat terdahulu. Ramadhan juga menyatukan Umat Islam bersama Umat manusia lainnya dengan taqwa yaitu perilaku kebaikan dan berkeunggulan.

"Artinya umat Islam sejatinya jangan memosisikan diri sebagai Umat yang terpisah dan sendirian sehingga bisa terus dipojokkan atau bahkan diasingkan, melainkan Umat Islam merupakan bagian dari kebaikan global yang dalam sejarahnya terus berkontribusi positif pada peradaban dunia. Dan itu semuanya merupakan ajaran dan inspirasi Ramadhan," ujarnya.

Apalagi, imbuhnya, tren yang meningkat belakangan ini yakni semakin banyaknya apresiasi bagi Umat Islam yang sedang berpuasa dari banyak negara di dunia, seperti di



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta II

"Dengan berpuasa di bulan Ramadhan ini, Umat Islam tidak hanya menghadirkan kesalahan individual, tapi juga kesalahan sosial berskala global, berupa saling berbagi, saling membantu, saling menghargai sesama, yang lingkungnya tidak hanya dalam skala lokal, tapi bahkan terjadi secara masif dalam skala global"

Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan lainnya.

"Itu menandakan di tengah begitu banyaknya masalah global, Islam dan Umat Islam melalui ibadah puasa di bulan

Ramadhan justru bisa menghadirkan harmoni dan dihormati oleh sesama Umat Manusia," ujarnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Reses di Dapil, Nasir Djamil Berbagi Sembako Ramadhan

## KUTIPAN

Banda Aceh (26/04) --- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Nasir Djamil menggelar rangkaian kegiatan berbagi sembako dan kebahagiaan Ramadhan bersama Anggota Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Aceh.

Kegiatan yang dilakukan berupa penyerahan paket sembako kepada sejumlah penerima manfaat di Banda Aceh.

"Saya mendukung penuh Bapak Ibu yang bergabung sebagai Anggota Pertuni Aceh, momen silaturahmi ini senantiasa menjadi perjalanan Saya untuk terus konsisten berupaya membuka berbagai kemajuan bagi masyarakat kita yang tidak terbatas," kata Nasir.

Menurutnya, berbagi di bulan suci Ramadhan membawa keberkahan yang tak terhingga. Legislator asal Aceh ini akan terus melanjutkan kegiatan-kegiatan serupa.

"Semangatnya menghadirkan lebih banyak peluang kebaikan dalam

menjaga optimisme masyarakat sepanjang Ramadhan dan Idulfitri 1443 H, di tengah tantangan masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun ini," papar Nasir.

Nasir dalam sambutannya berharap masa yang akan datang bisa dijalankan kegiatan pemberdayaan yang sustain bagi anggota Pertuni Aceh, tidak hanya pembagian sembako yang bersifat hit and run.

Ketua Pertuni Aceh M. Nur menyambut baik kebersamaan Nasir Djamil dengan anggota Pertuni. Ia mengatakan kegiatan-kegiatan Nasir Djamil bersama Pertuni Aceh sangat sering dilakukan.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## H.M. NASIR DJAMIL, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Nangroe Aceh Darussalam II

"Semangatnya menghadirkan lebih banyak peluang kebaikan dalam menjaga optimisme masyarakat sepanjang Ramadhan dan Idulfitri 1443 H, di tengah tantangan masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga tahun ini,



# Di Nagari Terpencil, Hermanto Ajak Masyarakat **Berlomba** Raih Lailatul Qodar

## KUTIPAN

Kabupaten Solok (27/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dapil Sumbar I Hermanto dalam kunjungan kerjanya di daerah pemilihan singgah di Nagari Batubajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok memberikan sambutan pada pembukaan acara Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nagari setempat di Masjid Jami Batubajanjang.

"Pelaksanaan MTQ ini sudah masuk pada 10 malam terakhir di Bulan Ramadhan, dimana di satu malam diantaranya ada Lailatul Qodar (malam qodar)," ucap Hermanto dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan MTQ yang berlangsung remang-remang karena aliran listrik padam akibat hujan deras.

Lailatul Qodar itu, lanjutnya, lebih baik dari 1000 bulan atau sekitar 83 tahun.

"Saat ini malam tersebut ada dihadapan kita, hanya kita tidak tahu di malam yang mana

yang bernilai Lailatul Qodar. Karena itu mari kita isi malam yang masih tersisa dengan itikaf di masjid untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT," papar legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hermanto berharap, kegiatan MTQ yang sengaja dilakukan di 10 malam terakhir bulan Ramadhan ini sekaligus mengingatkan masyarakat Islam bahwa saat ini ada Lailatul Qodar.

"Harapannya, selain ada yang berlomba menjadi juara MTQ, seluruh masyarakat juga

berlomba untuk mendapatkan Lailatul Qodar," tuturnya.

"Kalau MTQ, juaranya hanya beberapa orang. Tapi kalau perlombaan meraih Lailatul Qodar, juaranya bisa banyak orang," pungkas Hermanto.

Batubajanjang adalah salahsatu nagari terpencil di Kabupaten Solok. Untuk mencapainya dibutuhkan waktu sekitar 3 jam dari Kota Solok.

Sebelum kegiatan membuka MTQ, dalam kesempatan kunjungan ke nagari tersebut Hermanto juga turut membagikan makanan ringan untuk buka puasa di Jorong Kampung Tengah dan buka puasa bersama tokoh setempat di jorong Koto Tuo.

Setelah membuka kegiatan MTQ di Nagari Batubajanjang, Hermanto melanjutkan perjalanan ke Nagari Simanau masih di Kecamatan Tigo Lurah. Di nagari ini Hermanto beserta tim mengadakan itikaf di Masjid Baitul Makmur dan pagi keesokan harinya memberikan ceramah subuh dilanjutkan menyerap aspirasi masyarakat setempat.



**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I

“Saat ini malam tersebut ada dihadapan kita, hanya kita tidak tahu di malam yang mana yang bernilai Lailatul Qodar. Karena itu mari kita isi malam-malam yang masih tersisa dengan itikaf di masjid untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT”



# Jelang Idul Fitri Aleg DPR RI Fahmy Alaydroes Sebar 1000 Paket Ramadhan di Dapil

## KUTIPAN

Depok (27/04) — Jelang Hari Raya Idul Fitri 2022 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor Fahmy Alaydroes membagikan 1000 paket Ramadhan bagi masyarakat Kab. Bogor yang tersebar di 40 kecamatan.

Giat tersebut dimulai Rabu (27/04/2022) dan dipusatkan di Kantor DPD PKS Kabupaten Bogor, jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, dan langsung dibagikan ke 435 desa.

Fahmy Alaydroes menyatakan bahwa bantuan 1000 paket Ramadhan tahun ini dikhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Bogor.

“Selain itu giat ini juga instruksi langsung dari fraksi PKS DPR RI dan Ketua Majelis Syuro (KMS) PKS Dr. Salim Segaf, sekaligus sosialisasi

KMS sebagai tokoh nasional Indonesia,” tutur Fahmy saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon.

Kemudian Fahmy Alaydroes pun berharap bantuan ini bisa memperkuat kebersamaan, semangat saling memberi yang tidak melihat dari besar kecilnya bantuan tersebut.

“Jelang Idul Fitri 1443 Hijriah ini saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor,” tutup Fahmy Alaydroes.



**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat V

“Bantuan 1000 paket Ramadhan tahun ini dikhususkan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Bogor. Selain itu giat ini juga instruksi langsung dari fraksi PKS DPR RI dan Ketua Majelis Syuro (KMS) PKS Dr. Salim Segaf, sekaligus sosialisasi KMS sebagai tokoh nasional Indonesia”



# Ulang Tahun ke-20 PKS, Ledia Hanifa **Adakan** Lomba Stand Up Comedy di Dapil

**KUTIPAN**

Bandung (25/04) --- Ulang Tahun ke-20 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 April 2022 kali ini disemarakkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa dengan menyelenggarakan Lomba Stand Up Comedy bertema Hidupku Terjebak di Medsos.

Anggota Komisi X DPR RI ini menjelaskan bahwa dalam kehidupan yang penuh dinamika, tak melulu bisa dihadapi dengan keseriusan, ketegangan dan kerutan kening

"Kita memerlukan penyeimbang, satu hal yang bisa mengendorkan emosi, menyegarkan suasana termasuk lewat ungkapan humor dan canda. Maka menghadirkan lomba 'stand up comedy' ini menjadi satu pilihan kami untuk memaknai 20 tahun kebersamaan PKS di Indonesia." kata Ledia

Apalagi, lanjut aleg dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini 'stand up comedy' juga bisa

hadir mewakili curahan hati maupun sikap kritis masyarakat pada beragam situasi sosial politik terkini dengan cara unik, ringan dan jenaka.

"Sudah jamak kita lihat dan dengar curhat maupun kritik sosial tersampaikan lewat 'stand up comedy' yang lugas dan dalam namun tetap bisa menghadirkan senyum dan tawa penerimaan yang lapang. Karena setiap komedi tentu intinya harus tetap berada pada konteks menghibur bukan menyakititi." lanjutnya

Dari puluhan pendaftar lomba, tersaring 12 finalis yang menyampaikan penampilan terbaik mereka di acara final di

kantor DPD PKS Kota Bandung pada 24 April 2022 lalu.

Dari 12 finalis ini dewan juri yang terdiri atas komika Anyun Cadel dan pegiat seni Daan Aria memilih tiga orang juara.

Juara pertama diraih oleh Yadi Badoet asal Ciwidey, juara kedua diraih oleh Aep Statham asal Cimahi dan juara ketiga diraih oleh Dicky Herawan asal Cimahi.

"Senang sekali PKS bisa memberikan ruang bagi para seniman termasuk para komika maupun komedian untuk tampil menyuarakan diri. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Dan tentu kami berharap hal ini akan terus berlanjut di masa yang akan datang." harap komika Anyun Cadel diakhir acara.



**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat I

"Sudah jamak kita lihat dan dengar curhat maupun kritik sosial tersampaikan lewat 'stand up comedy' yang lugas dan dalam namun tetap bisa menghadirkan senyum dan tawa penerimaan yang lapang. Karena setiap komedi tentu intinya harus tetap berada pada konteks menghibur bukan menyakititi."



# Bukber Bersama UMKM Dapil, Amin Ak. **Bagikan** **400 Bingkisan** **Lebaran**

## KUTIPAN

Jember (22/04) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menggelar acara buka bersama dengan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jember, Jawa Timur, Kamis (21/04/2022).

Usai berbuka bersama, Wakil Rakyat dari Jawa Timur 4 (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu membagikan 400 paket bingkisan Lebaran dan sembako kepada peserta Bukber.

Selain pegiat UMKM, acara Bukber dan pembagian

bingkisan lebaran juga dihadiri para Kyai, Tokoh Masyarakat, dan sejumlah kepala desa.

Selain bersilaturahmi, Amin juga menyerap aspirasi dari warga yang menjadi konstituennya.

"Program pembagian ini merupakan bagian dari program dua juta bingkisan yang dicanangkan PKS. Ini merupakan salah satu cara PKS untuk berkhidmat pada rakyat," kata Amin.

Lebih lanjut Anggota Ko-

misi VI DPR RI itu mengatakan, pasca pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat masih sulit dan belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, dibutuhkan gerakan kolektif bersama untuk membantu meringankan beban ekonomi tersebut.

Gerakan ini, imbuhnya, diinisiasi oleh Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri yang meminta kader PKS untuk meningkatkan kepedulian dan semangat berbagi di Ramadhan.

"Dan ini merupakan cara kader PKS menindaklanjuti pesan dan amanah Dr Salim agar kami lebih peduli dan lebih semangat berbagi di Ramadhan," ujar Amin.



**AMIN AK, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Jawa Timur IV

"Program pembagian ini merupakan bagian dari program dua juta bingkisan yang dicanangkan PKS. Ini merupakan salah satu cara PKS untuk berkhidmat pada rakyat,"

# Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan, Rofik Bagikan THR ke 1000 Guru Ngaji

## KUTIPAN

Purbalingga (27/04) --- Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rofik Hananto bersama dengan PT Herba Emas Wahidatama Purbalingga memberikan santuan kepada total 1.000 guru ngaji di Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen

"Ada 1.000 guru ngaji yang mendapat zakat karyawan dan zakat perusahaan PT HEW. Yani 500 guru ngaji di Purbalingga, 250 orang di Banjarnegara dan 250 orang di Kebumen," kata Rofik di Pendapa Dipokusumo, Purbalingga, Selasa (26/04/2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi kebahagiaan kepada kepada para guru ngaji. Zakat ini berasal dari zakat perusahaan PT HEW, zakat karyawan yang dikumpulkan setiap bulan dan terkumpul dalam setahun untuk dibagikan.

"Ini juga merupakan wujud dukungan perusahaan kepada masyarakat untuk meringankan

beban dari dampak pandemi Covid-19," ungkap Rofik.

Rofik menilai, zakat yang diberikan kali ini tidak sebanding dengan dedikasi dan pengorbanan yang sudah dilakukan para guru ngaji selama ini.

"Tapi semoga dengan apresiasi ini kita bisa bersama-sama mendapatkan kebaikan dan keberkahannya, ikut serta membangun akhlak dan memahamkan masyarakat untuk kenal dengan agama ini dengan baik," katanya.

Bupati Purbalingga yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda HR Imam Wahyudi

mengungkapkan Pemkab Purbalingga menyambut baik kegiatan ini. Selain sebagai bentuk berbagi kebahagiaan di Bulan Ramadhan, kegiatan ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada para guru ngaji yang telah memberikan dharma baktinya.

"Semoga apa yang telah diberikan oleh PT Herba Emas Wahidatama bermanfaat bagi keluarga serta mampu menggugah dan menginspirasi berbagai badan usaha, organisasi sosial, ormas dan organisasi keagamaan untuk bersama-sama turut mensukseskan program peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purbalingga," ungkapnya.

Direktur Eksekutif LAZIS Jateng, Doso Sutrisno merasa berbahagia dalam bersinergi dengan PT HEW untuk mendistribusikan zakat perusahaan khususnya untuk para guru ngaji. Ia juga mengakui peran para guru ngaji sangat besar dan mulia.

"Kami paham bahwa pemahaman dasar anak-anak kita itu bermula salah satunya



## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII

"Zakat yang diberikan kali ini tidak sebanding dengan dedikasi dan pengorbanan yang sudah dilakukan para guru ngaji selama ini. Tapi semoga dengan apresiasi ini kita bisa bersama-sama mendapatkan kebaikan dan keberkahannya, ikut serta membangun akhlak dan memahamkan masyarakat untuk kenal dengan agama ini dengan baik

dari para guru ngaji semuanya," ungkapnya.

Ia menjelaskan LAZIS Jateng secara khusus di bulan Ramadhan juga menargetkan untuk bisa berbagi di seluruh Jawa Tengah dengan target

50.000 penerima manfaat. Zakat perusahaan dari PT HEW ini diharapkan bisa memantik perusahaan lain untuk melakukan hal serupa yakni berbagi dengan saudara-saudara di sekitarnya.



# Aleg PKS Minta Presiden Bertanggungjawab atas Kebocoran Gas di PT SMGP Mandailing Natal

## KUTIPAN

Mandailing Natal (27/04) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis meminta Presiden Republik Indonesia agar segera turun tangan untuk mengatasi persoalan kebocoran pengeboran pipa gas oleh PT. SMGP Madina.

"Aktifitas pekerjaan dalam bidang pengeboran sumur gas oleh PT. SMGP Madina ini telah banyak selalu memakan korban jiwa," ungkapnya.

Ini, kata Iskan, bukan kali pertama saja, karena di tahun 2021 bulan Januari pernah terjadi peristiwa serupa yang menewaskan 5 orang warga disana dan bahkan di bulan Maret tahun 2022 kemarin terjadi kembali setidaknya sebanyak 57 warga dilarikan ke Rumah Sakit, Lalu April tahun 2022 menjelang Hari Raya Idul Fitri insiden ini kembali terjadi dan telah merugikan warga sekitar di Dapil saya khususnya di daerah Mandailing Natal,

Sumatera Utara.

"Hal ini tentu saja membuat saya dengan cepat untuk meminta pemerintah pusat kepada Presiden agar dapat menghentikan proyek PT SMGP madina itu yang sekiranya akan membahayakan nyawa warga disana, karena pastinya warga di sekitar sana sangat mekhawatirkan kejadian tersebut bisa terulang kembali", Ujar Iskan.

Politisi asal Sibuhuan ini juga menambahkan bahwa Presiden harus memperhatikan masyarakat di sekitaran Madina yang menjadi korban dari kebocoran pipa gas PT SMGP Madina ini.

"Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia agar memperhatikan para korban jiwa warga di sekitaran mandailing natal yang terdampak kebocoran pipa gas dari PT SMGP itu untuk di beri bantuan sosial, harapannya agar psikologis mereka juga teratasi dengan baik serta di beri pendampingan materil untuk warga disana. Perlu saya tekan kan juga disini keselamatan warga di sekitaran Sorik Merapi mandailing natal itu harus menjadi prioritas utama yang sangat perlu di perhatikan oleh pemerintah khususnya Presiden. Oleh karena nya mengingat sangat penting nya hal ini saya harapkan Presiden Joko Widodo dapat segera turun tangan di Wilayah PT SMGP Mandailing Natal agar dapat segera mengambil langkah yang tegas serta memberikan sanksi terhadap PT SMGP dan masalah ini dapat secara cepat terselesaikan", Tegas Iskan.

Lebih lanjut, Iskan juga menambahkan bahwa jangan sampai hanya mengedepankan motif bisnis dan keuntungan



**H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.**

Dapil Sumatera Utara II

"Saya minta kepada Presiden Republik Indonesia agar memperhatikan para korban jiwa warga di sekitaran mandailing natal yang terdampak kebocoran pipa gas dari PT SMGP itu untuk di beri bantuan sosial, harapannya agar psikologis mereka juga teratasi dengan baik serta di beri pendampingan materil untuk warga disana"

tapi keselamatan warnyanya terancam setiap detikinya.

"Kejadian ini sudah beberapa kali terjadi, harus nya sudah berulang terjadi belajar lah dari insiden sebelum nya. Kalau sudah seperti ini dampak nya pasti ke warga di sekitaran

mandailing natal tersebut, warga sekitar pasti sangat panik dan gelisah mungkin mereka juga pasti akan merasakan trauma dari kejadian yang menimpanya. Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Live Interactive

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



ERLANDA

WIDYA

YOANDRO



## Saksikan Setiap Jum'at

pk. 13.30 s.d 14.30 WIB



# Aleg PKS: Kami Akan Perjuangan Nasib Guru Swasta

KUTIPAN

Jakarta (20/04) --- Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menerima aspirasi secara virtual dari perwakilan forum guru swasta pada Rabu, (20/4).

Pada kesempatan tersebut, perwakilan aspirator menyampaikan keluhan terkait dengan penempatan guru swasta kembali pada sekolah asal walaupun sudah lolos seleksi P3K, Rabu Pagi, (20/04).

Bejo dan Ester, selaku representatif aspirator yang berkesempatan hadir dalam ruang aspirasi ini menyampaikan secara detail problematika yang dialami oleh guru swasta terkait dengan keputusan itu. Menurut mereka, keputusan ini sangat merugikan para guru swasta yang sudah berhasil lolos seleksi P3K mengingat banyak dari para guru tersebut yang akhirnya merelakan statusnya sebagai guru swasta karena mengambil jalan seleksi P3K.

"Karena ada yang sejak pengumuman kelulusan pada bulan Januari atau Februari tidak bekerja lagi, ada yang mulai

ujian bulan November pun sudah dipecah dari yayasannya. Bahkan, ada yang baru mendaftar pun sudah dipecah dari yayasannya. Selain dipecah, guru swasta yang masih dipertahankan pun tidak diberikan pasangan" ucap Ester.

Perlakuan semacam ini harus diterima para guru swasta karena mereka dianggap tidak loyal kepada sekolah swasta yang seharusnya menjadi tempat mengabdikan. Padahal, imbuhnya, guru swasta ini merupakan orang-orang yang berpotensi mengingat sebagian dari mereka menduduki jabatan yang strategis di sekolah, seperti kepala sekolah dan bendahara bos.

"Kami memohon agar guru-guru swasta yang telah lolos tidak dikembalikan ke sekolah asal karena hal tersebut tidak memungkinkan

lagi. Posisi yang dimiliki sebelumnya telah ditempati oleh orang-orang yang baru. Mohon untuk dipikirkan kembali nasib kami agar sama dengan ASN yang lain karena payung hukum kami adalah ASN. Mohon untuk tidak untuk menerima honorer lagi di negeri agar kami bisa masuk sesuai dengan hak kami" pungkask Ester, menegaskan permohonan.

Abdul Fikri Faqih selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyambut dengan sangat baik aspirasi yang disampaikan oleh forum guru swasta ini. Sebagai tindak lanjut, politisi senior dari Fraksi PKS ini meminta kepada forum guru swasta ini untuk mengajukan surat resmi atas nama forum kepada DPR RI terkait dengan keberatan dikembalikan ke sekolah asal. Menurutnya, surat resmi ini diperlukan untuk digunakan sebagai informasi perbandingan sehingga pertimbangan yang dilakukan akan semakin komprehensif.

Anggota legislatif dengan daerah pemilihan Jawa Tengah ini pun menutup pengarahannya dengan beberapa isu terkait guru swasta yang tengah diperjuangkan.

"Kami juga terus memperhatikan hak-hak guru swasta. Setidaknya terdapat 3 hak guru swasta yang harus diperjelas. Guru itu, baik yang ada di negeri maupun swasta harus ada kejelasan status. Kemudian yang kedua



**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI

"Kami juga terus memperhatikan hak-hak guru swasta. Setidaknya terdapat 3 hak guru swasta yang harus diperjelas. Guru itu, baik yang ada di negeri maupun swasta harus ada kejelasan status. Kemudian yang kedua kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan yang setara terdengar ambigu.

kesejahteraan, yang dimaksud dengan kesejahteraan yang setara terdengar ambigu. Yang ketiga adalah kejelasan jaminan sosial, berpikirnya

harus sosial bukan orang per orang. Ini yang mau kita kejar agar guru swasta jejak karirnya jelas" tutupnya.

Apresiasi Kesepakatan BP MPR  
Tak Amandemen Konstitusi

## HNW: Agar Tak Ditunggangi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

### KUTIPAN

Jakarta (16/04) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kesepakatan bulat Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR dari seluruh Fraksi partai-partai politik di MPR dan juga kelompok DPD di MPR,

untuk tidak mengamandemen UUD demi mewujudkan rekomendasi MPR periode sebelumnya yaitu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

BP MPR menyepakati untuk hadirin PPHN cukup melalui undang-undang saja. Itulah yang sejak semula menjadi sikap Gerindra, Golkar, PD dan PKS.

HNW sapaan akrabnya menjelaskan bahwa sikap Badan Pengkajian MPR ini sudah sangat tepat, apalagi ditengah kondisi politik yang tak kondusif yang menghadirkan kegaduhan publik seperti isu amandemen Konstitusi untuk

penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan presiden yang digulirkan segelintir kelompok belakangan ini.

“Sangat tepat, itu juga untuk menutup kotak pandora amandemen UUD NRI 1945 agar tidak ditunggangi oleh segelintir orang untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (15/04/2022).

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa sikap hati-hati ini memang perlu dilakukan. Apalagi, salah satu Fraksi di MPR, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

(FPKS) sudah menyampaikan hal ini, yakni PPHN cukup diakomodasi ke dalam undang-undang, tidak perlu dimasukkan ke UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan amandemen.

Hasil kesepakatan rapat pleno Badan Pengkajian MPR ini akan diserahkan ke pimpinan MPR, dan segera dilakukan rapat gabungan di MPR untuk pengambilan keputusan terhadap hasil rapat tersebut.

HNW mengaku yakin bila koleganya sesama pimpinan MPR akan sejalan dengan hasil rapat Badan Pengkajian MPR ini. Apalagi, sebelumnya, mayoritas pimpinan MPR juga sudah menegaskan bahwa MPR tidak ada agenda mengamandemen UUD NRI 1945 untuk memperpanjang masa jabatan.

“Komitmen ini tentu perlu kita jaga bersama. Selain untuk menjawab tuntutan publik dan Mahasiswa, itu juga untuk menutup peluang ditungganginya isu amandemen untuk perpanjangan masa presiden tiga periode,” tukasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

“Sikap hati-hati ini memang perlu dilakukan. Apalagi, salah satu Fraksi di MPR, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) sudah menyampaikan hal ini, yakni PPHN cukup diakomodasi ke dalam undang-undang, tidak perlu dimasukkan ke UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan amandemen.”

# Ditengah Ramadhan, Habib Aboe Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesetiakawanan Sosial

## KUTIPAN

Jakarta (21/04) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengingatkan agar masyarakat terus mengedepankan kesetiakawanan sosial.

Hal ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Habib Aboe saat menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Banjarmasin (21/04). Nilai kesetiakawanan sangatlah penting untuk dikembangkan saat bulan Ramadhan.

"Bulan Ramadhan itu penuh keberkahan, harus kita optimalisasikan untuk berbagi kepada sesama. Apalagi di masa pandemi, banyak orang yang memiliki keterbatasan dan perlu mendapatkan dukungan. Banyak yang masih terdampak covid-19, masih mengalami persoalan ekonomi. Moment bulan Ramadhan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna membantu mereka," papar Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Kalsel I

tersebut.

Lebih lanjut Habib Aboe menjelaskan bahwa berbagai di Bulan Ramadhan adalah bagian dari kesetiakawanan sosial.

"Membantu tetangga dengan berbagi sembako atau makanan adalah termasuk kesetiakawanan sosial. Nilai tolong menolong seperti ini sebenarnya sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Makanya kita juga memperingati adanya hari kesetiakawanan sosial".

"Kesetiakawanan sosial seperti ini adalah implementasi dari Pancasila, Sikap tolong menolong seperti ini merupakan pengamalan dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab", terang Ketua

Mahkamah Kehormatan Dewan ini.

"Nilai nilai seperti ini penting, karenanya kita selalu mengingatkan pentingnya saling tolong-menolong, sikap kesetiakawanan sosial dan lain lain saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Hal ini penting untuk selalu mengingatkan antar sesama anak bangsa", papar Sekjen DPP PKS ini.



"Bulan Ramadhan itu penuh keberkahan, harus kita optimalisasikan untuk berbagi kepada sesama. Apalagi di masa pandemi, banyak orang yang memiliki keterbatasan dan perlu mendapatkan dukungan. Banyak yang masih terdampak covid-19, masih mengalami persoalan ekonomi. Moment bulan Ramadhan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna membantu mereka



**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I

# Dr. Salim Berdoa Untuk Keselamatan Bangsa dan Negara di Tanah Suci

## KUTIPAN

Mekkah (15/04) -- Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri atau yang akrab dipanggil Dr. Salim tengah melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Salim Segaf didampingi Presiden PKS Ahmad Syaikh, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman dan Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.

Salim Segaf secara khusus memimpin doa untuk keselamatan bangsa dan negara. Salim juga mendoakan agar rakyat Indonesia diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai problematika tanah air mulai dari masalah pandemi, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Tak lupa, Salim Segaf mendoakan para elit pemimpin bangsa diberikan iradah untuk melahirkan kebijakan yang pro rakyat dan jauh dari perilaku mengeruk keuntungan pribadi. Bangsa Indonesia bersatu dan jauh dari upaya pecah belah.

Doa khusus tersebut dilantunkan saat Menteri Sosial

RI 2009-2014 itu berada di Masjid Quba, Masjid pertama yang didirikan Rasulullah SAW.

"Yaa Allah, jadikanlah negeri kami (Negara Kesatuan Republik Indonesia) penuh damai, aman, tenteram dan sejahtera. Yang selalu mendapat perlindungan dari-Mu. Berikan hidayah kepada para pemimpin bangsa untuk menuruskan niat dan tetap istiqamah dalam membangun negeri yang sama-sama kita cintai," ucap Salim dalam pengalangan doanya.

Duta Besar RI Untuk Saudi Arabia dan Kesultanan Oman 2005-2009 ini berdoa agar Indonesia senantiasa dijaga dari bala dan musibah, senantiasa aman dan damai terutama selama bulan suci ramadhan ini.

"Jauhkan bangsa dan

negara kami dari segala bala dan musibah. Berikan saudara-saudara kami (yang sedang berjuang) di negeri tercinta taufik dan hidayah-Mu. Berikan kesejahteraan dan keamanan di bulan Ramadhan yang mulia ini. Berikan kekuatan, persatuan, dan kekokohan dalam membangun negeri dan meluruskan penyimpangan yang terjadi," seru Salim yang diamankan para jamaah yang baru melaksanakan shalat sunnah di Masjid Quba.

Khusus kepada kepada generasi muda, Salim mendoakan: "Bagi mereka yang sedang menuntun ilmu (para mahasiswa dan pelajar) mudahkan mereka untuk menyerap ilmu dan menerapkannya," pintanya.

Kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, Salim berdoa agar diberikan jalan keluar.

"Ya Rabb angkatlah kesejahteraan dari saudara-saudara kami yang kesulitan. Sungguh banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan kesusahan hidup sehari-hari. Berikan mereka pekerjaan dan upah yang layak," doa mantan Menteri



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

Ya Rabb angkatlah kesejahteraan dari saudara-saudara kami yang kesulitan. Sungguh banyak saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan dan kesusahan hidup sehari-hari. Berikan mereka pekerjaan dan upah yang layak

Sosial itu dengan lirin dan menghargukan.

Sebagai penutup, Salim berharap agar Indonesia terhindar dari perpecahan dan segala upaya pecah belah bangsa.

"Ya Allah Yang Mahamulia dan Mahaperkasa, jauhkan bangsa kami dari gejala keretakan sosial-politik.

Bagi mereka yang memiliki niat buruk bagi bangsa kami, Yaa Allah, luruskan motivasinya dan cegahlah agar tidak menimbulkan keburukan.

Terimalah ibadah kami, puasa dan shalat kami, sedekah dan zakat kami. Ridhailah segala pengorbanan bangsa kami," pungkas Salim Segaf.

# Dr. Salim Silaturahmi dan Memberi Tausiyah di Majelis Ulama Kharismatik Kota Makkah

## KUTIPAN

Makkah (16/04) — Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri memimpin rombongan DPP PKS yang terdiri dari Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini,

melakukan silaturahmi kepada tokoh ulama kharismatik 'ahlusunnah waljamaah' Kota Makkah Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki di Hay Al Rashifah pinggiran kota Mina Arab Saudi, Kamis Malam, (14/04/2022).

Dalam lawatan silaturahmi di sela-sela ibadah umroh tersebut Dr. Salim disambut hangat oleh Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki dan para murid serta jamaahnya. Sayyid Ahmad sendiri adalah putera dari Ulama Besar Timur Tengah, pengajar di Masjidil Haram, serta rujukan dan guru bagi para ulama Indonesia yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah (wafat tahun 2004).

Dr. Salim dan rombongan hadir di kediaman Sayyid Ahmad yang dibangun oleh ayahanda beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang dapat menampung ratusan santri setiap hari.

Kehadiran Dr. Salim bertepatan dengan kajian rutin Sayyid Ahmad bersama para santrinya dari berbagai negara termasuk dari Indonesia, membahas Kitab Al-zakhaa'ir Al-Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.

Dalam kajiannya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki diantaranya memotivasi jamaah untuk senantiasa menyukuri nikmat keislaman, nikmat menjadi

umatnya Nabi Muhammad SAW, serta nikmat selalu istiqomah dalam majelis ilmu, karena menurut Sayyid Ahmad majelis ilmu ini adalah laksana suasana surgawi yang Allah hadirkan di dunia agar umat Islam merasakan sebagian kecil nikmatnya surga.

Dr. Salim dan rombongan DPP PKS bersama ratusan santri yang hadir malam itu mendengarkan dengan khidmat buliran ilmu dari kitab Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki melalui wasilah lisan Sayyid Ahmad.

Hingga diakhir kajian, Sayyid Ahmad meminta Dr. Salim untuk memberikan tausiyah kepada para jamaah yang hadir.

Dalam tausiyahnya, Dr. Salim mengajak jamaah untuk senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah SWT dan menguatkan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan keturunannya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

Dr. Salim mengajak jamaah untuk senantiasa istiqomah melaksanakan perintah Allah SWT dan menguatkan mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan keturunannya.



# Dr. Salim : PKS Gencarkan Gernas Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan untuk Ringankan Beban Rakyat

## KUTIPAN

Jakarta (27/04) --- Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dr. Salim Segaf Al-Jufri menggelar Buka Puasa Bersama sekaligus Aksi Solidaritas Sosial PKS bagi masyarakat kurang mampu pada hari Rabu, (27/04) di Jakarta.

Menurut Dr. Salim acara semacam ini serentak dilakukan oleh struktur PKS di seluruh Indonesia selama bulan Ramadhan. Yakni dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan'.  
"Program Gernas Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membantu masyarakat mempersiapkan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan komitmen, ikhtiar, dan kolaborasi PKS sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk hadir menyelesaikan permasalahan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan beban rakyat. Inilah upaya PKS untuk mewujudkan solidaritas sosial

Nasional bangsa Indonesia," ujar Salim dalam sambutannya.

### PKS Prihatin Beban Berat Ekonomi Rakyat

Dr. Salim membuka sambutannya dengan memaparkan kondisi penyebaran Covid-19 yang sudah berlangsung dalam dua tahun terakhir, sehingga membuat meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

"Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2021 mencapai 26,50 juta orang atau 9,71 persen. Adapun jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta

penduduk atau sebesar 6,49 persen," sebut Dr. Salim.

Menteri Sosial 2009-2014 ini menambahkan terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, bahan bakar minyak (BBM), dan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per 1 April, telah menyebabkan tekanan terhadap daya beli masyarakat makin tinggi.

"Sejalan dengan kondisi itu, hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan sebanyak 66,3 persen menganggap bahwa Pemerintah tidak mampu mengendalikan kenaikan harga bahan pokok di bulan puasa. Jajak pendapat yang digelar Litbang Kompas tersebut juga menunjukkan bahwa, mayoritas responden mengalami kesulitan membeli kebutuhan pokok pada awal April 2022 lalu. Dimana tujuh dari sepuluh responden mengaku kesulitan menjangkau bahan kebutuhan pokok," terang Dr. Salim

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

"Program Gernas Berbagi 2 Juta Paket Ramadhan yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam membantu masyarakat mempersiapkan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan komitmen, ikhtiar, dan kolaborasi PKS sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk hadir menyelesaikan permasalahan di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan beban rakyat. Inilah upaya PKS untuk mewujudkan solidaritas sosial Nasional bangsa Indonesia"

# Dr. Salim Pimpin Rombongan DPP PKS Ziarah ke Makam Ibunda Khadijah dan Ulama Dunia

## KUTIPAN

Makkah (19/04) --- Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Aljufri memimpin rombongan DPP PKS yang terdiri atas Presiden PKS Ahmad Syaikh, Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman, dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwiani berziarah ke makam Jannatul Ma'la.

Di Jannatul Ma'la Dr. Salim dan rombongan mendoakan seluruh kerabat dan sahabat serta para ulama yang dimakamkan di sini. Serta secara khusus berdoa di pusara Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, ulama dunia asal Indonesia Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Timur Tengah dan pengajar di Masjidil Haram Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, serta ulama Nahdlatul Ulama KH. Maemon Zubair.

Pada tiap-tiap pusara, Menteri Sosial RI 2009-2014 ini memberikan pesan keteladanan dari para kekasih Allah SWT tersebut.

"Sayyidah Khadijah adalah

teladan muslimah di seluruh dunia. Beliau selalu berada di samping Rasulullah di awal-awal kenabian dan dikala susah penuh cobaan. Beliau tidak pernah mengeluh sekalipun. Hingga Rasulullah begitu memuliakannya," ungkap Salim.

Di pusara Imam Nawawi Al-Bantani, Salim Segaf mengatakan Imam Nawawi adalah ulama kharismatik tanah air yang sangat mashur dan sangat dihormati kontribusi keilmuannya bagi dunia Islam. Mengarang banyak sekali kitab rujukan khususnya bagi kalangan pesantren di Asia Tenggara.

"Kepada beliau kita belajar betapa kuat kesunggu-

han dalam mendalami Ilmu agama hingga mendapatkan tempat mulia di kota suci Makkah Al-Mukarramah dan dunia Islam," tandas Salim.

Selain Imam Nawawi, tercatat ada sejumlah ulama nusantara lainnya yang juga dimakamkan di Jannatul Ma'la yaitu Syaikh Ahmad Khatib Sambas, Syaikh Junaid Betawi, Syaikh Abdul Haq Banten, Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syaikh Abdul Hamid Kudus, Syaikh Mahfuzh Tremas, Syaikh Mukhtar Bogor, Syaikh Umar Sumbawa, Syaikh Abdul Qadir Mandailing, Syaikh Yasin Padang.

"Syaikh Nawawi Al-Bantani, Syaikh Junaid Betawi, dan Syaikh Ahmad Khatib Minangkabawi adalah 3 orang Indonesia yang pernah menjadi Imam Masjidil Haram. Masya Allah," ungkap Salim Segaf.

Selanjutnya, Dr. Salim berdoa di makam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Dr. Salim menghormati beliau sebagai guru dan guru para ulama nusantara dan dunia. Diantara jasa besarnya adalah selalu menyediakan



**Dr. SALIM**  
Ketua Majelis Syuro PKS

Imam Nawawi adalah ulama kharismatik tanah air yang sangat mashur dan sangat dihormati kontribusi keilmuannya bagi dunia Islam. Mengarang banyak sekali kitab rujukan khususnya bagi kalangan pesantren di Asia Tenggara.

kuota santri dan ulama dari Indonesia untuk menerima pengajaran langsung dari beliau selama beberapa tahun tanpa dipungut biaya, dan kembalinya ke tanah air mereka menyebarkan serta mengokohkan aqidah 'ahlussunnah wal jamaah'.

Terakhir, Dr. Salim berziarah ke makam KH.

Maimun Zubair (Mbah Moen), tokoh ulama kharismatik dari Pesantren Al Anwar Rembang. Beliau dikenal sebagai ulama yang faqih sekaligus tawaduh dan teduh dalam dakwah sehingga begitu dihormati dan dicintai umat Islam tanah air.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Umroh Bareng Sekjend PKS

# Doakan Terwujudnya Cita-Cita Nasional

### KUTIPAN

Makkah (24/04) -- Segenap jajaran DPP PKS gelar melaksanakan umroh bareng sepuluh hari terakhir ramadhan 1443 H.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS, Aboebakar Alhabsy mengatakan kegiatan Umroh ini membawa semangat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia.

"Kenapa disebut umroh kemenangan ? Karena visi misi PKS itu sebagai partai pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Artinya jika PKS menang, maka kepeloporan untuk mewujudkan cita-cita nasional akan semakin kuat," ungkap Anggota Komisi III DPR RI ini.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini mengatakan seluruh rombongan akan mengetuk pintu langit, supaya diberikan kepemimpinan nasional yang kuat.

"Artinya, Kepemimpinan yang akan menjadi pelopor

untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia, kepemimpinan yang dapat mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan NKRI," ujar Habib Aboe.

Keberadaan pemimpin yang adil ini penting, lanjutnya, menurut Imam Ahmad, jika akan diberikan satu doa yang pasti diijabah, maka akh akan meminta diberikan pemimpin yang adil.

"Karena dengan pemimpin yang adil, akan dapat membawa kebaikan untuk banyak orang," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



### HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Sekjen DPP PKS

"Kegiatan Umroh ini membawa semangat untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kenapa disebut umroh kemenangan ? Karena visi misi PKS itu sebagai partai pelopor untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Artinya jika PKS menang, maka kepeloporan untuk mewujudkan cita-cita nasional akan semakin kuat"



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/CKSTV-DPR-RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***